

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Januari III Tahun 2021 No. 3

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Fraksi PKS DPR RI

Kembali Potong Gaji Bantu Korban Bencana





STOP Buat Kebijakan Anomali di Masa Pandemi

Rasanya kita sulit menebak arah dan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi Covid 19 dan bencana alam yang sedang terjadi

Dibidang kesehatan, alih-alih menekan laju pandemi dan memproteksi tenaga kesehatan yang ada justru sebaliknya. Strategi vaksinasi, rotasi kerja dan tunjangan untuk tenaga kesehatan telat. Ada yang sudah dapat, namun yang belum dapat lebih banyak. Janji tinggal janji.

Pada level publik, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hampir tidak ada bedanya. Tempat publik masih ramai dikunjungi oleh orang banyak, berhamburan ke semua sisi. Dari kota ke desa, pun sebaliknya. Dari ramai, menuju kerumunan. Dalam situasi tersebut ironisnya ketersediaan kamar ICU dan perawatan di Rumah Sakit (RS) menuju titik nadir terendah. Sangat mungkin Dead Lock!

Viral seorang pasien dari depot meninggal dunia di taksi online akibat hampir 10 rumah sakit yang didatanginya penuh (bukan menolak). Inalillahi wa innalillahi rojiun. Perih kita mendengar cerita pilu seperti itu, badan kita rasanya lenglai dan dada sesak tersedak. Bisa jadi itu terjadi pada siapapun, baik yang punya kuasa atau bagi mereka yang papa dan dhuafa.

Dalam persoalan penanganan bencana kondisi serupa terjadi, setali tiga uang. Tidak jauh beda dan sulit menemukan titik terang karena sejak awal terkesan semua "salah cuaca" dan "suratan alam", bukan pada kesalahan tata kelola. Jadi sangat wajar hingga pada akhirnya kita menemukan jawaban apa adanya : Bahwa air yang merendam satu provinsi, karena hujan lebat. longsor yang terjadi, karena hujan lebat. Dari awal tidak bicara penyebab utama dan akar masalah. Rumit dan "Ruwet".

Saat dihadang bencana yang bertubi-tubi, tubir kesadaran pemangku kebijakan ternyata semakin jauh dari realitas. Buktinya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan jauh dari apa yang sedang mengharu biru. Karena tiba-tiba muncul

Disaat kita butuh bersama dan berkolaborasi sebagai sebuah bangsa, meski dalam prosesnya kerap berbeda pandangan. Tentu tidak harus diambil sebuah kesimpulan sebagai bentuk agitasi, bahkan anehnya respon balik yang dilakukan dengan memaksakan cara pandang hingga ke bentuk dan definisi. "Kalau kata pemerintah itu hoax, ya hoax!". Kita benar-benar khawatir Pemerintah kehilangan fokus dan tidak benar-benar paham tentang skala prioritas apa yang harus dilakukan



peraturan presiden (perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstremisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya. Sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. Bukti beda diagnosis dengan obat yang dibutuhkan.

Sejalan dengan itu gagasan Pam Swakarsa dihidupkan kembali dalam ruang publik. Kembali

kesadaran kita terhenyak, sebenarnya apa yang sedang benar-benar kita hadapi. Pandemi atau cara kita berpikir? entahlah anomali perumusan kebijakan macam apa yang sedang terjadi.

Disaat kita butuh bersama dan berkolaborasi sebagai sebuah bangsa, meski dalam prosesnya kerap berbeda pandangan. Tentu tidak harus diambil sebuah kesimpulan sebagai bentuk agitasi, bahkan anehnya respon balik yang dilakukan dengan memaksakan cara pandang hingga ke bentuk dan definisi. "Kalau kata pemerintah itu hoax, ya hoax!".

Kita benar-benar khawatir Pemerintah kehilangan fokus dan tidak benar-benar paham tentang skala prioritas apa yang harus dilakukan.

Ditengah gencarnya vaksin, maka sudah sepatasnya pemerintah harus terus meningkatkan strategi testing, tracing, dan treatment (3T) serta menggenckarkan pemberian edukasi kepada masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan. itu yang utama, bukan membiarkan masyarakat saling lapor karena cara pandang yang berbeda. Ampun gusti.

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Bantu Korban Bencana



99 KUTIPAN

Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu sebagaimana yang telah berulang kali kami lakukan, Fraksi PKS kembali melakukan aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Untuk Bantu Korban Bencana

KUTIPAN

Kebijakan Fraksi PKS DPR ini, insya Allah diikuti oleh seluruh Anggota Fraksi PKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sambari berharap semoga upaya kolektif ini dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

Jakarta (18/01) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginstruksikan seluruh Anggota Fraksi PKS secara nasional (dari pusat hingga daerah) untuk membantu korban bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Kalsel, Kalbar, Sulawesi khususnya di Majene dan Manado, dan beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera. Untuk merealisasikan hal itu, setiap Anggota Fraksi PKS dipotong gajinya sebagai wakil rakyat.

"Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu sebagaimana yang telah berulang kali kami lakukan,

Fraksi PKS kembali melakukan aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat," ungkap Jazuli.

Kebijakan Fraksi PKS DPR ini, lanjut Jazuli, insya Allah diikuti oleh seluruh Anggota Fraksi PKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sambari berharap semoga upaya kolektif ini dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

"PKS sendiri telah menerjukan kader dan relawan serta mendirikan posko di lokasi-lokasi bencana berkoordinasi dengan instansi pemerintahan/BPBD setempat. Ini semua bagian dari upaya PKS memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyat terutama mereka yang

tertimpa musibah," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak seluruh elemen dan komponen masyarakat bergerak bersama membantu korban bencana melalui saluran-saluran yang ada, instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial yang kredibel dan terpercaya.

"Semoga Allah ringankan ujian dan segera angkat berbagai musibah dan bencana dari negeri Indonesia yang kita cintai bersama, amiin ya Robbal aalamin," tutup Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu sebagaimana yang telah berulang kali kami lakukan, Fraksi PKS kembali melakukan aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan

Netty Ingatkan Pemerintah Jangan Lepas Tangan

KUTIPAN

Jakarta (21/01) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani meyakini bahwa kerusakan lingkungan akibat penambangan menjadi penyebab banjir yang tak kunjung surut di Kalsel.

"Pemerintah jangan jadikan intensitas curah hujan sebagai kambing hitam. Penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan di hulu akibat lubang galian penambangan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Oleh sebab itu, pemerintah jangan lepas tangan, karena persoalannya berawal dari kewenangan pemberian izin galian dan alih fungsi lahan," kata Netty dalam rilisnya Kamis, (21/01).

Berdasarkan laporan LAPAN, imbuhnya, alih fungsi lahan terjadi secara signifikan selama 10 tahun terakhir sejak 2010-2020.

"Luas hutan primer berkurang 13 ribu hektare, lahan sekunder 116 ribu hektare, sawah 146 ribu

hektare, dan semak belukar 47 hektare. Sedangkan lahan perkebunan bertambah 219 ribu hektare dengan 650 hektare-nya berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito," ungkap Ketua DPP PKS Bidang Kesra ini.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mempertanyakan bagaimana tidak banjir, jika daerah serapan air makin berkurang karena alih fungsi lahan yang begitu masif tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam.

"Setiap yang kita ambil dari alam, pasti alam akan meminta kembali dalam bentuk lain," ujarnya mengingatkan.

Menurut Netty, data yang dihimpun Walhi di Kalsel dari 3,7 juta ha, hampir 50% sudah menjadi peruntukan izin

tambang dan sawit.

"Bahkan, sampai tahun 2020 ada 814 lubang tambang di Kalsel baik masih aktif maupun sudah ditinggal tanpa reklamasi. Temuan ini saya yakin sudah jamak diketahui pemerintah tapi nihil eksekusi," tandasnya.

Netty meminta Pemerintah agar melakukan evaluasi proses perizinan galian tambang dan perkebunan sawit secara menyeluruh di Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.

"Lakukan evaluasi sebagai langkah antisipatif. Jangan menunggu bencana, baru ketar-ketir melakukan evaluasi. Pastikan setiap perizinan usaha telah melakukan analisis dampak lingkungan dan pertimbangan lain yang harus dipenuhi. Jangan sampai ada oknum yang memberi jalan singkat untuk pengusaha tapi mengorbankan masyarakat di kemudian hari," kata Ketua Tim Satgas Covid-19 Fraksi PKS ini.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

"Lakukan evaluasi sebagai langkah antisipatif. Jangan menunggu bencana, baru ketar-ketir melakukan evaluasi. Pastikan setiap perizinan usaha telah melakukan analisis dampak lingkungan dan pertimbangan lain yang harus dipenuhi. Jangan sampai ada oknum yang memberi jalan singkat untuk pengusaha tapi mengorbankan masyarakat di kemudian hari."

Do'a Kita Untuk Indonesia

PKS turut berduka atas bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah SWT. Aamiin.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Wakil Ketua FPKS Pertanyakan Motif Presiden Terbitkan Perpres No. 7 Tahun 2021

KUTIPAN

Jakarta (20/01) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melalui Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukum, Sukamta mempertanyakan apa motif Presiden Jokowi melahirkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Sukamta, Perpres tersebut ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan terhadap permasalahan ekstrimisme di lingkungan sekitar ini mendapatkan kritikan beragam dari berbagai pihak salah satunya F-PKS DPR RI.

"F-PKS DPR RI memberikan beberapa catatan kritis terkait Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Apa motif pemerintah melahirkan Perpres esktrimisme ini? Padahal sudah ada UU Terorisme yang dipergunakan untuk memberantas teroris. Apakah perpres ini benar-benar menyasar pencahangan tindakan terorisme atau punya motif lain. Ini yang menjadi catatan pertama dari F-PKS DPR RI," sebut Anggota

Komisi I DPR RI ini.

Catatan kedua dari F-PKS menurut Doktor Lulusan Inggris ini mengenai multitafsir ekstrimisme.

"Tafsir ekstrimisme versi pemerintah ini berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi. Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstrimisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya. Sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. Misal, ada laporan dari masyarakat kepada kepolisian terhadap orang atau kelompok dengan keyakinan tertentu yang dianggap mendukung ekstrimisme kekerasan polisi pun akan mentafsirkan laporan

secara subjektif," ungkapnya.

Kalau pemerintah serius mau memberantas terorisme, imbuh Sukamta, maka pergunkan Undang-Undang Terorisme.

Selama ini UU Terorisme hanya dipergunakan untuk mengadili pelaku teroris dengan baju agama Islam. Sedangkan kelompok pemberontak, makar di Papua tak pernah ditangani layaknya kasus terorisme namun hanya ditangani seperti kelompok kriminal bersenjata biasa," papar Sukamta lebih lanjut.

Anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta ini kemudian memberikan sebuah hipotesis tentang tujuan dilahirkanya Perpres ini.

"Kita sebagai bagian yang sedang diluar pemerintah yang punya agenda, mudah saja kelak membuktikan apa tujuan lahirnya perpres ini. Jika KKB Papua tidak ditangani selayaknya kasus terorisme, kemudian pemerintah menangani kasus ekstrimisme lain yang level ekstrimnya masih di bawah KKB Papua maka perpes ini memang bertujuan



H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

"Tafsir ekstrimisme versi pemerintah ini berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi. Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstrimisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya. Sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir

untuk menekan kelompok ekstrimis sesuai tafsir pemerintah bukan benar-benar bertujuan memberantas ekstrimisme kekerasan mengarah ke terorisme," papar Sukamta.

PKS Menolak ekstrimisme Sementara itu, PKS jelas dalam

menyikapi permasalahan ekstrimisme. Sukamta, yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PKS Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri menyebutkan

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Aleg PKS Minta Pimpinan DPR Gelar Rapat Gabungan untuk **Dorong Produksi Vaksin Merah Putih**

KUTIPAN

Jakarta (19/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pimpinan Komisi VII menyelenggarakan rapat gabungan bersama Komisi IX dengan mengundang Menristek, Menkes, Satgas Covid-19, BPOM dan BUMN Bio Farma.

Rapat diselenggarakan, untuk membahas percepatan jadwal uji pra klinis dan uji klinis vaksin merah serta membahas dukungan Pemerintah untuk menyertakan vaksin Merah Putih dalam program vaksinasi nasional double doses.

Hal itu disampaikan Mulyanto saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menristek/Ka BRIN, Direktur LBM Eijkman dan Kepala LPNK Ristek, Senin (18/1) di Gedung Nusantara 1, Komplek DPR RI.

"Hal ini penting karena kita tengah berkejaran dengan waktu terkait pandemi Covid-19 ini. Komitmen terhadap 3 juta vaksin Sinovac sudah terlanjur diambil Pemerintah meski vaksin ini hanya memiliki efikasi

sebesar 65%. Karena itu masih diperlukan tambahan lebih dari 100 juta dosis vaksin untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. Jumlah ini sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk," tegas Mulyanto.

Menurut Mulyanto, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu Mulyanto khawatir uang negara yang terbatas dan didapat dari utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor.

"Karena itu sangat masuk akal kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah

Putih agar segera digunakan bagi pemulihan pandemi Covid-19. Jangan sampai terlambat yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Mulyanto menambahkan pengadaan vaksin tidak boleh dimonopoli oleh satu produk dengan harga yang tak terkendali. Menurutnya, potensi pasar vaksin jangan hanya dinikmati oleh berbagai produk impor yang menyedot devisa Negara. Untuk itu perlu intervensi Negara untuk mendorong riset dan produksi vaksin Merah Putih.

"Ini penting agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi Negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator handal nasional. Kita bisa," tandas Mulyanto.

Dalam Raker bersama Komisi VII DPR RI, Senin (18/1) Menristek/Ka BRIN menyatakan ada 11 platform riset vaksin Merah Putih oleh 6 lembaga riset yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwalkan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu Mulyanto khawatir uang negara yang terbatas dan didapat dari utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor".

pada bulan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022.

Raker Komisi VII DPR RI dengan Menristek/ Kepala BRIN

ditutup dengan kesepakatan akan segera menjadwalkan rapat gabungan komisi DPR untuk membahas percepatan riset dan produksi vaksin Merah Putih.



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Kapal Berbendera China
Masuk Selat Sunda

Aleg PKS: Menlu RI Harus Tegur Dubes China

KUTIPAN

Tasikmalaya (16/01) --- Satu unit kapal asing masuk ke perairan Selat Sunda (13/01/2021). Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI membenarkan berita tersebut dan menyebutkan kapal itu berbendera China.

Bakamla RI berhasil membayangi Kapal bernama Xiang Yang Hong 03 tersebut. Kapal Xiang Yang Hong 03 sedang berlayar di Selat Sunda dengan kecepatan 10,9 knots dengan haluan ke arah barat daya.

Anggota Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat, berikan apresiasi kepada Bakamla RI yang segera mengetahui kapal berbendera China masuk ke wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), padahal Kapal tersebut diduga mematikan AIS (Automatic Identification System) sebanyak tiga kali.

"Saya mengapresiasi Bakamla RI yang segera mengetahui adanya kapal asing mema-

suki perairan Indonesia sekaligus menghalau keluar wilayah perairan Indonesia", ungkap Toriq.

Namun Toriq menyayangkan berulangnya kapal China masuk ke perairan Indonesia tanpa pemberitahuan. Apalagi Kapal China yang masuk ke selat Sunda tersebut diduga kapal yang digunakan untuk melakukan survei.

"Pemerintah Indonesia patut mencurigai maksud dan tujuan kapal survei berbendera China tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia. Apalagi, anehnya, Kapal tersebut diduga mematikan AIS (Automatic Identification

System) sebanyak tiga kali", ungkap Toriq.

IS merupakan sistem tracking kapal otomatis yang berisi informasi mengenai keadaan kapal baik posisi, waktu, haluan, dan kecepatan.

"Padahal, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis, setiap kapal Indonesia ataupun kapal asing yang melintasi perairan Indonesia wajib mengaktifkan AIS", tambah Toriq.

Karenanya, Toriq akan meminta Menteri Luar Negeri RI, untuk menegur Kedubes China di Jakarta.

"Meminta klarifikasi maksud dan tujuan kapal survei China masuk ke wilayah Indonesia. Dan memastikan agar kapal-kapal China meminta izin ketika akan masuk ke perairan Indonesia," tegas Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI



"Pemerintah Indonesia patut mencurigai maksud dan tujuan kapal survei berbendera China tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia. Apalagi, anehnya, Kapal tersebut diduga mematikan AIS (Automatic Identification System) sebanyak tiga kali"

Palestina Akan Gelar Pemilu

Politisi PKS: Indonesia Perlu Hadir Dorong Rekonsiliasi

KUTIPAN

Jakarta (19/01) --- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan akan menggelar pemilihan umum parlemen dan presiden pada tahun ini.

Pemilihan legislatif rencana digelar pada 22 Mei sementara pemilihan presiden pada 31 Juli mendatang. Adapun pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina direncanakan pada 31 Agustus 2021.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyambut baik rencana pesta demokrasi Rakyat Palestina tersebut.

Menurut Sukamta, ini akan menjadi momentum yang sangat berharga bagi Bangsa Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya.

"Sudah lebih dari 14 tahun Palestina alami pertikaian politik antara kubu Hamas dan Fatah sebagai imbas hasil Pemilu 2006 yang dimenangkan Hamas. Rencana pemilu yang akan digelar tahun ini akan jadi babak baru merajut persatuan nasional. Ini momen yang tidak hanya

dirindukan oleh rakyat Palestina, kita Bangsa Indonesia juga sangat berharap faksi-faksi yang bertikai di Palestina bisa segera bersatu. Tanpa persatuan tentu akan lebih sulit mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap pemerintah RI perlu segera mendorong proses rekonsiliasi faksi-faksi yang bertikai di Palestina.

"Indonesia punya pengalaman untuk mendamaikan beberapa konflik di dunia, sementara sikap Indonesia hingga saat ini tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Saya yakin dengan posisi Indonesia yang konsisten hingga hari ini, faksi-faksi di Palestina tentu akan menerima ajakan Indonesia untuk diadakan forum

rekonsiliasi," terang Sukamta.

Dalam pandangan Ketua Bidang Pembinaan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini, rencana pemilu Palestina akan berada dalam situasi politik regional yang pelik karena beberapa negara di timur tengah seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan disusul Maroko melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh sebab itu, Palestina tentu memerlukan dukungan yang lebih besar dari negara-negara lain yang masih komit mendukung kemerdekaan Palestina.

"Komitmen Presiden Jokowi yang kerap disampaikan untuk wujudkan kemerdekaan Palestina perlu dihadirkan dalam agenda nyata. Momentum hadapi pemilu palestina kali ini bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia ikut terlibat secara aktif mendorong proses persatuan nasional Palestina. Bu Menlu bisa segera melakukan komunikasi untuk menawarkan maksud baik Indonesia memfasilitasi proses rekonsiliasi," saran Sukamta mengakhiri.

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

Indonesia punya pengalaman untuk mendamaikan beberapa konflik di dunia, sementara sikap Indonesia hingga saat ini tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel.

Surahman Hidayat Tegaskan Presiden Jadi Penanggungjawab Penanganan Covid-19

KUTIPAN

Posisi Menteri, Gubernur, Walikota maupun Bupati sebagai pembantu Presiden di wilayahnya masing-masing dalam meminimalisasi penyebaran covid 19 maupun manajemen fasilitas kesehatan di wilayahnya

Jakarta (21/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat berpendapat, penanggung jawab penanganan covid 19 ada dipundak presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan.

Menurut Surahman, posisi Menteri, Gubernur, Walikota maupun Bupati sebagai pembantu Presiden di wilayahnya masing-masing dalam meminimalisasi penyebaran covid 19 maupun manajemen fasilitas kesehatan di wilayahnya.

Surahman meminta Presiden untuk mensupervisi Kepala Daerah dalam menangani Covid 19, sehingga kebijakan di tiap daerah memiliki irama dan efektivitas yang sama.

"Presiden harus mensupervisi Kepala Daerah agar kebijakan di daerah memiliki irama dan efektivitas yang sama sehingga Indonesia bisa segera keluar dari pandemi covid 19. Kita tidak tahu batas maksimal masyarakat bisa bertahan, karena covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat," ujar Surahman.

Anggota fraksi PKS DPR RI mengingatkan, penanganan Covid-19, kerja kolektif yang dipimpin oleh Presiden, dibantu oleh DPR RI untuk merumuskan kebijakan dan budgeting, dalam pelaksanaannya dibantu kementerian dan kepala daerah.

"Ini kerja bersama, tidak bisa mengandalkan kepala

daerah saja untuk mengendalikan penyebaran covid 19 dan menangani pasien positif covid 19. Pemerintah Daerah memiliki berbagai keterbatasan, khususnya keterbatasan wilayah. Pemerintah Daerah tidak bisa mengambil kebijakan penuh mengatur pergerakan masyarakat di luar wilayahnya. Pemerintah Daerah juga tidak bisa menolak pasien yang tidak berdomisili di daerahnya dengan dasar kemanusiaan," terang Surahman.

Menurut Surahman, situasi covid 19 saat ini memasuki situasi kritis, setiap hari terjadi peningkatan positif rate secara signifikan.

"Kita butuhkan supervisi Presiden, dan komitmen Kepala Daerah seirama dengan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden," pungkas Surahman.

**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi II DPR RI

"Presiden harus mensupervisi Kepala Daerah agar kebijakan di daerah memiliki irama dan efektivitas yang sama sehingga Indonesia bisa segera keluar dari pandemi covid 19. Kita tidak tahu batas maksimal masyarakat bisa bertahan, karena covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat



Fraksi PKS Menyetujui
Komjen Listyo Sigit
Prabowo sebagai Kapolri

DENGAN SEJUMLAH CATATAN



KUTIPAN

Penting untuk ditegaskan, bahwa ekstrimisme dan radikalisme merupakan musuh bersama dan tidak mengenal agama. Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut

**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**
Anggota Komisi III DPR RI

Dengan Sejumlah Catatan, Fraksi PKS Menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Komisi III DPR RI hari melakukan Fit and Proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan bagi Calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/01).

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS yang diwakili Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimiyati Natakusumah menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang penting di negeri ini.

"Polri menjadi etalase hukum di Indonesia. Baik buruknya hukum dapat tercermin dari sikap dan profesionalitas yang ditunjukkan aparat Polri dalam menangani berbagai persoalan hukum", ungkap Dimiyati.

Lambang Polri, Rastra Sewakottama, yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari

pada Nusa dan Bangsa," kata Dimiyati, harus dimanifestasikan secara nyata dan sungguh-sungguh.

"Makna lambang tersebut memposisikan Polri sebagai alat negara yang berada ditengah, bersikap adil, non partisan, tidak terlibat politik praktis, apalagi menjadi alat kekuasaan. Nusa dan Bangsa merupakan prioritas utama Polri", urainya.

Polri dibawah Kapolri baru, imbuh Dimiyati, harus selalu berupaya membuktikan makna lambang tersebut secara profesional dan proporsional sesuai cita negara hukum Indonesia dalam menangani

berbagai permasalahan hukum.

"Beberapa permasalahan yang harus ditangani dengan baik antara lain: Reformasi kepolisian harus terus berjalan, Kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum, Bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstremisme dan radikalisme serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut," pungkasnya.

Penting untuk ditegaskan, lanjut Dimiyati, bahwa ekstremisme dan radikalisme merupakan musuh bersama dan tidak mengenal agama.

"Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut," paparnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**DR. H. R. A. DIMIYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

"Penting untuk ditegaskan, bahwa ekstremisme dan radikalisme merupakan musuh bersama dan tidak mengenal agama. Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut

Penunjukan Komjen LSP
sebagai Kapolri

Habib Aboe Harap ada Perubahan Ditubuh Kepolisian

KUTIPAN

Jakarta (20/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy menanggapi penunjukan tunggal Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan yang digelar, Rabu, (20/01/2021).

"Selamat atas diusulkannya Komjend LSP sebagai calon Kapolri yang hari ini telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III. Ada empat pekerjaan rumah yang menunggu beliau saat nanti menjadi Kapolri baru," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Pertama, kata Habib Aboe, penunjukan LSP ini melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan, untuk lebih meningkatkan performa institusi-si Polri dalam menjalankan tugasnya.

"Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu

penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya," papar Habib Aboe yang tetap mengikuti Fit and Proper Test melalui online meski masih dalam pemulihan.

Artinya, imbuhan Habib Aboe, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. "Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik," tegasnya.

Sebaliknya, kata Habib Aboe, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri.

"PR Kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang seperti ini perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo," terangnya.

Misalkan saja, katanya, Bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdodkes Polri.

"Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNs Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra," imbuhnya.

Tentunya, ungkap Aboe, kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi poli maupun profesionalisme Polri.

"Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjend LSP," ungkapnya.

PR Ketiga, tambahannya, adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya."

"Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat," paparnya.

Jika kita lihat, urainya,

selama umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hasil Uji Kelayakan
Calon Kapolri

Adang Daradjatun: Harapan Kita Keadilan bagi Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (21/01) —
Anggota Komisi III
DPR RI dari Fraksi
PKS, Komjen Pol
(Purn) Adang
Daradjatun berharap

Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) baru pengganti Jenderal Polisi Idham Aziz bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Adang menekankan, Polri ke depan harus mampu bersikap rendah hati tetapi tetap memiliki karakteristik tegas.

"Harapan-harapan kita, masyarakat terutama, Polri ke depan adalah Polri yang sangat humble tetapi tegas. Terutama beliau (Calon Kapolri) jelas sekali penekanan tentang tidak ada istilahnya tajam ke bawah lalu tumpul ke atas," ungkap Adang jelang Rapat Paripurna

membahas Laporan Komisi III tentang Hasil Uji Kelayakan terhadap Calon Kapolri.

Lebih jauh, Wakapolri periode 2004-2006 itu berharap penegakan hukum harus ditegakkan berbasis rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Jadi apapun juga kita mengharapkan betul-betul rasa keadilan bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum, itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat," tutur Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III itu.

Politisi PKS ini turut mengapresiasi Calon Kapolri tunggal Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo atas penyampaian pandangannya dalam rapat uji kelayakan lalu.

"Saya mendengar dan saya bangga, bapak Calon Kapolri Sigit telah memberikan suatu jawaban-jawaban yang memang menjadi harapan bagi masyarakat pada saat uji kelayakan kemarin." pungkasnya.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Harapan-harapan kita, masyarakat terutama, Polri ke depan adalah Polri yang sangat humble tetapi tegas. Terutama beliau (Calon Kapolri) jelas sekali penekanan tentang tidak ada istilahnya tajam ke bawah lalu tumpul ke atas.

PANDANGAN FRAKSI PKS DPR RI

TERHADAP USULAN KOMJEN (POL) Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M. Si. SEBAGAI KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Disampaikan oleh :
Dr. H.R.A Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (A-448)

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang penting di negeri ini. Polri menjadi etalase hukum di Indonesia. Baik buruknya hukum dapat tercermin dari sikap dan profesionalitas yang ditunjukkan aparat Polri dalam menangani berbagai persoalan hukum.

Lambang Polri, Rastra Sewakottama, yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa," harus dimanifestasikan secara nyata dan sungguh-sungguh. Makna lambang tersebut memposisikan Polri sebagai alat negara yang berada ditengah, bersikap adil, non partisan, tidak terlibat politik praktis, apalagi menjadi alat kekuasaan. Nusa dan Bangsa merupakan prioritas utama Polri.

Polri dibawah Kapolri baru

harus selalu berupaya membuktikan makna lambang tersebut secara profesional dan proporsional sesuai cita negara hukum Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan hukum. Beberapa permasalahan yang harus ditangani dengan baik antara lain:

- 1 Reformasi kepolisian harus terus berjalan dalam rangka mewujudkan Institusi Kepolisian yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).
- 2 Kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum yang didasarkan pada konsep restorative justice sehingga perkara pidana tertentu seperti diatur dalam RKUHP & RKUHUH maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diselesaikan dengan pendekatan mediasi penal yang berorientasi kepada kepentingan korban.
- 3 Bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstremisme dan radikalisme serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut. Penting untuk ditegaskan, bahwa ekstremisme dan radikalisme merupakan musuh bersama dan tidak mengenal agama.
- 4 Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus pembunuhan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut.
- 5 Mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat mengenai excessive use of force yang dilakukan Polri, apalagi unlawful killing.
- 6 Penanganan terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dilakukan secara adil dan proporsional. Indonesia harus terbebas dari segala bentuk hoax, fitnah dan ujaran kebencian tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan.
- 7 Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan (prokes) COVID-19 harus ditanggulangi secara adil dan proporsional. Prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan.

Fraksi PKS tentu saja berharap, insitusi Polri semakin solid dan

Polri harus mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat mengenai excessive use of force yang dilakukan Polri, apalagi *unlawful killing*.

menjadi institusi yang dicintai masyarakat, terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketaqwaan, keberanian dan pengayoman masyarakat.

Setelah mendengar, mengikhti dan mencermati rangkaian proses dari uji kelayakan Calon Kapolri di Komisi 3 DPR-RI, kami berkesimpulan bahwa KOMJEN (POL) Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M. Si., merupakan pribadi dengan rekam jejak yang baik sehingga kiranya mampu dan layak untuk mengemban amanah estafet kepemimpinan di institusi kepolisian.

Dengan pertimbangan diatas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)

memutuskan untuk MENYETUJUI USULAN PENGANGKATAN, KOMJEN (POL) Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M. Si., sebagai KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA untuk diproses ketahap selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta,
7 Jumadil Akhir 1442 H
20 Januari 2021 M

Selamat

Atas terpilihnya

Komjen (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si
Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Semoga dapat melaksanakan amanah
dengan sebaik-baiknya



Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo bukan kali pertama berinteraksi dengan FPKS, dalam banyak kesempatan. Seperti Kursus Singkat Ketahanan Nasional 2020. Kami berharap dapat menunaikan tugas dengan profesional, menegakan hukum dan humanis.

Legislator PKS Pertanyakan Pengaturan Impor Hortikultura

KUTIPAN

Jakarta (19/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, mempertanyakan soal izin impor komoditas hortikultura

Pasalnya, menurut Slamet, pengaturan impor komoditas hortikultura melalui sistem kuota sedangkan perizinan berusaha lebih melihat ke sisi bisnis yang tidak lagi menjadikan kuota sebagai alat pembatas impor yang utama.

"Jika melihat data nilai impor produk hortikultura khususnya buah dan sayuran (trademap.com), China adalah Negara terbesar yang menyuplai kedua produk tersebut," ujar Slamet kepada media disela-sela RDP dengan Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Hortikultura untuk kemajuan sektor hortikultura di Indonesia.

Menurut Slamet, Fraksi vPKS melihat kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap produk hortikultura asal China.

"Pertanyaannya bagaimana cara Indonesia untuk mengurangi ketergantun-

gan tersebut terutama buah yang melonjak sangat signifikan di era Presiden Jokowi ini," tegas Slamet.

Oleh sebab itu, sambung Slamet, pihaknya berharap ada komitmen Pemerintah untuk meningkatkan produksi. Selain itu, kata dia, ada upaya untuk pengendalian impor hortikultura.

"Di era UU Cipta kerja pembatasan impor sudah hamper tidak relevan lagi. Sehingga beberapa ahli mengatakan bahwa membangun strategi perdagangan adalah jawaban dari dihilangkannya pembatasan impor," ungkapnya.

Meelalui Penyusunan posisi ofensif dan defensif, imbuhnya, tentunya dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan perdagangan Internasional.

"Posisi yang cenderung

defensif semisal substitusi impor dianggap menunjukkan orientasi masih pada inward looking/kepentingan sesaat," paparnya.

Strategi promosi ekspor, lanjut dia, semakin diperlukan dengan pondasi daya saing, dibangun dengan investasi yang membawa manfaat baik sisi suplai maupun demand.



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI



Fraksi PKS melihat kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap produk hortikultura asal China. Pertanyaannya Bagaimana cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan tersebut terutama buah yang melonjak sangat signifikan di era Presiden Jokowi ini,"

Turunkan Harga Daging Sapi, Politisi PKS Desak Pemerintah Lakukan Pengadaan di Dalam Negeri

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Pemerintah melakukan pengawasan stok dan distribusi daging sapi menyusul ancaman mogok jualan para pedagang daging di Jabodetabek akibat kenaikan harga yang signifikan komoditas tersebut.

Hermanto mendesak Pemerintah agar melakukan pengadaan daging dari dalam negeri untuk mengatasi lonjakan harga.

"Pemerintah, lakukan berbagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga daging tersebut. Sementara Pemerintah bekerja, pedagang dihimbau tetap berjualan agar tidak terjadi kelangkaan daging di pasar yang membuat situasi bertambah runyam," papar Hermanto mengomentari ancaman mogok jualan para pedagang daging di Jabodetabek.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan ada pertemuan beberapa pedagang daging yang mengkonsolidasikan pedagang-pedagang daging yang lain untuk mogok.

Pedagang mengancam mogok jualan karena kenaikan harga daging sapi yang signifikan. Hal ini membuat pedagang kesulitan menjual daging sapi.

Kenaikan harga, kata Hermanto, biasanya disebabkan kurangnya stok komoditas terkait yang dikirim ke pasar.

"Pemerintah harus mencari tahu penyebabnya, apakah akibat ada sumbatan pada rantai distribusi ataukah karena stoknya kurang," papar Legislator Fraksi PKS ini.

Menurutnya, kalau ada sumbatan dalam distribusi misal karena ada indikasi penimbunan maka tindak tegas pelakunya.

"Kalau ternyata stoknya memang kurang, maka tambah stok daging dari sumber dalam negeri. Cegah para pihak yang memanfaatkan kenaikan harga ini dengan memasukkan daging impor," tandas Hermanto.

Impor daging, kata Hermanto, sangat melukai pelaku peternakan di dalam negeri.

Impor daging bisa menghilangkan insentif harga yang membuat peternak tidak lagi bergairah memelihara sapi karena dipandang merugikan," pungkas Legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

“Kenaikan harga biasanya disebabkan kurangnya stok komoditas terkait yang dikirim ke pasar. Pemerintah harus mencari tahu penyebabnya, apakah akibat ada sumbatan pada rantai distribusi ataukah karena stoknya kurang”



Legislator PKS Dorong Pemerintah **Lakukan 6T** sebagai Kunci Keberhasilan Pupuk Bersubsidi

KUTIPAN

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan keberhasilan pelaksanaan pupuk subsidi yang begitu besar pada alokasi APBN akan sangat tergantung efektivitas implementasi 6T yang telah umum pada peran Pupuk Indonesia

6T ini adalah Tepat Mutu, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, & Tepat Harga.

Akmal menyebut, Semua Lini mulai dari pabrik, Unit pengolahan, Gudang produsen pupuk, Gudang distributor, gudang pengecer hingga ke end user yakni petani menjadi rantai utama penyaluran pupuk subsidi.

"Dengan memastikan baiknya setiap lini pupuk hingga ke petani akan menjadi efektif dan efisiennya proses pelaksanaan distribusi pupuk. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, sejauh mana 6T ini terlaksana. Mengingat hingga saat ini banyak yang mengata-

kan pupuk subsidi belum efektif padahal anggarannya melebihi APBN Kementerian Pertanian itu sendiri", tutur Akmal.

Politisi PKS ini menjelaskan, ketika melihat paparan kementerian pertanian yang menunjukkan biaya produksi padi di Indonesia cukup tinggi di banding vietnam dan thailand.

Untuk menghasilkan padi satu Kg, imbuhnya, di Indonesia biaya produksinya mencapai Rp. 4.552,-. Sedangkan di Vietnam hanya Rp.1.551,6 dan di Thailand Rp. 2.737,9. Padahal, biaya pupuk sendiri relatif kecil untuk Indonesia yakni Rp.289,8 untuk biaya produksi gabah per Kg.

"Pemerintah mengklaim biaya produksi padi akibat tingginya sewa lahan dan biaya pekerja. Tapi yang terlihat di lapangan adalah, kesejahteraan keluarga petani tidak kunjung membak 10 tahun terakhir", urai Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, evaluasi mendalam setiap kebijakan pangan dan pertanian ini, akan menjadi penting terutama pada pelaksanaan program nya.

"Negara ini akan menuju lebih baik manakala setiap rupiah uang negara dapat tersalur pada program kerakyatan tanpa ada kebocoran," ungkap Akmal.

Akmal menambahkan, Hingga saat ini, besarnya pupuk subsidi berkorelasi positif pada kenaikan produksi pangan nasional. Namun besarnya untuk menghentikan perilaku impor masih jauh dari harapan. Setiap tahun Indonesia selalu impor beras meskipun ada klaim dari pemerintah sendiri bahwa produksi nasional dinyatakan cukup.

"Kita semua berharap,



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Dengan memastikan baiknya setiap lini pupuk hingga ke petani akan menjadi efektif dan efisiennya proses pelaksanaan distribusi pupuk. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, sejauh mana 6T ini terlaksana. Mengingat hingga saat ini banyak yang mengatakan pupuk subsidi belum efektif padahal anggarannya melebihi APBN Kementerian Pertanian itu sendiri

kedepannya dengan diterapkannya kartu Tani, akan semakin meningkatkan kualitas 6T pada penerapan pupuk subsidi. Bukan hanya pupuk, tapi sarpras Pertanian, Benih dan pelaksanan program irigasi tersier dapat dilakukan

dengan segala ketepatan juga. Semakin baik pelaksanaan program dengan minimalisasi penyimpangan, akan memperkuat pertanian Indonesia di masa depan", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Johan Tegaskan Pemerintah Mesti **Optimalkan Penggunaan Dana Perkebunan untuk Rakyat**

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan pandangan Fraksi PKS terkait penggunaan dana perkebunan untuk peremajaan kelapa sawit

pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian dan Dirjen Perbenaharaan Kemenkeu serta Kepala Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit pada Hari Rabu, (20/01) di Gedung Parlemen.

Johan memaparkan bahwa negara kita memiliki kebun kelapa sawit terluas di dunia, yaitu seluas 16,3 juta hektar dan penyumbang devisa non migas terbesar yang mencapai Rp 320 Triliun pada tahun 2018 lalu.

"Namun seringkali para petani selalu mengeluhkan persoalan harga sawit yang rendah, maka pemerintah harus punya perencanaan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, membantu pengelolaan

perkebunan rakyat agar memiliki kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan petani dan memperluas lapangan kerja," papar Johan.

Politisi PKS ini meminta pemerintah segera menyelesaikan berbagai permasalahan peremajaan sawit rakyat, terutama perbaikan regulasi yang mengatur legalitas lahan petani, lahan yang berada pada Kawasan konservasi, kepemilikan lahan yang menyebar, dan kelembagaan petani.

"Saat ini, luas perkebunan rakyat dari komoditas kelapa sawit hanya mencapai 29% dari total seluruhnya. Ini menunjukkan terjadi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia dimana perusahaan besar (korporasi) telah menguasai

71% dari total luas lahan kelapa sawit. Pemerintah harus memperbaiki validitas sistem perijinan dan sistem tata Kelola komoditas kelapa sawit selama ini," tegas Johan.

Johan menambahkan bahwa legalitas lahan milik rakyat seringkali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan peremajaan sawit sehingga setiap tahun selalu jauh di bawah target.

"Saya meminta optimalkan upaya pemerintah pada tahun 2021 ini untuk mencapai target peremajaan sawit rakyat kita," cetus Johan.

Legislator dari NTB ini juga mempertanyakan peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan yang terus terjadi.

"Karena pada tahun 2015 lalu telah terjadi 127 konflik lahan yang luasnya mencapai 200.217 ha sebagai lahan konflik," ujar Johan.

Disamping itu menurut Johan, Tata Kelola sawit seringkali diduga menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan menyebabkan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan yang

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Saya meminta pemerintah optimalkan dana perkebunan untuk kepentingan peremajaan kelapa sawit rakyat, dengan target dan capaian terukur untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat

menimbulkan kerugian besar dan mengganggu Kesehatan masyarakat.

"Saya mendorong peran pemerintah untuk melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, karena peran kelembagaan ini sangat penting sebagai pemberdayaan petani dan mengoptimalkan program

bantuan serta sarana program kemitraan petani dengan pihak lain", tutur Johan.

Selanjutnya Johan menjelaskan bahwa target peremajaan kelapa sawit pada tahun 2021 ini adalah seluas 180.000 hektar.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Standar Pelayanan Minimal
Belum Terpenuhi

Batalkan Kenaikan Tarif Tol!

99 KUTIPAN

Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan tarif tol ini agar tidak memicu kenaikan biaya logistik dan mengembalikan jalan tol kepada fungsi semula sebagai tulang punggung logistik. Sebab hal ini berdampak kepada masyarakat luas dan juga UMKM yang membutuhkan pasokan logistik yang cepat dan murah

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Basarnas Diminta Prioritaskan Evakuasi Korban Reruntuhan Gempa Sulbar

KUTIPAN

Jakarta (15/01) --- Anggota Komisi V dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo meminta Basarnas yang merupakan mitra komisinya untuk memprioritaskan pencarian dan evakuasi korban bencana gempa Majene, Sulawesi Barat yang terjadi Jumat dini hari, (15/1/2021). Terutama, mereka yang terjebak pada reruntuhan bangunan.

"Saya minta Basarnas prioritaskan pencarian dan penyelamatan korban yang masih terperangkap. Semoga masih banyak yang bisa tertolong," kata Sigit dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat, (15/1/2021).

Menurut Sigit Basarnas bersama Kementerian PUPR harus bertindak cepat untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa.

Sigit meminta Kementerian PUPR menerjunkan alat berat sebanyak mungkin agar proses evakuasi bisa cepat dilakukan.

Ia juga berharap Kementerian PUPR segera memperbaiki infrastruktur yang rusak khususnya jalan agar memudahkan distribusi penyaluran bantuan.

"Jangan sampai ada jalan yang terputus apalagi daerah yang terisolir akibat gempa sehingga mempersulit pendistribusian bantuan. Saat ini ada belasan ribu warga yang mengungsi dan butuh bantuan," katanya.

Selain itu Sigit meminta kepada BMKG untuk terus melakukan update informasi. Terutama mengenai potensi adanya gempa susulan seperti

yang telah diperingatkan.

"BMKG sudah mengeluarkan peringatan akan adanya gempa susulan yang lebih besar dari gempa 6,2 SR hari ini. Saya berharap, semua instansi mulai dari pemda, BMKG, Basarnas dan elemen masyarakat untuk bersinergi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk guna menghindari korban jiwa yang lebih besar," katanya.

Sigit menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban gempa yang meninggal.

"Kita sangat prihatin dengan musibah ini dan saya mengucapkan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga diberi kekuatan menghadapinya," katanya.



I. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

BMKG sudah mengeluarkan peringatan akan adanya gempa susulan yang lebih besar dari gempa 6,2 SR hari ini. Saya berharap, semua instansi mulai dari pemda, BMKG, Basarnas dan elemen masyarakat untuk bersinergi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk guna menghindari korban jiwa yang lebih besar,"

Standar Pelayanan Minimal Belum Terpenuhi, Aleg PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Tol!

KUTIPAN

Jakarta (18/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memberlakukan kenaikan tarif pada enam ruas tol

yaitu Jakarta Outer Ring Road/JORR (E1, E2, E3, W2U dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami), Cikampek-Padalarang, Padalarang-Cileunyi, Semarang Seksi A,B,C, Palimanan-Kanci, dan Surabaya-Gempol.

Padahal, menurut pria yang akrab disapa SJP ini, berdasarkan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh BPJT pada tahun 2018 ditemukan beberapa ruas tol yang tidak memenuhi SPM yang terkait kondisi jalan serta keselamatan.

"Diantaranya pada ruas tol Cikampek - Padalarang terdapat masalah retak pada jalan, guardrail, marka jalan, reflektor dan penerangan jalan yang semuanya belum memenuhi SPM. Sedangkan pada ruas Padalarang-Cileunyi terdapat masalah retak pada jalan,

guardrail, lubang pada bahu jalan, serta reflektor untuk keselamatan," terang Anggota Komisi V DPR RI ini.

SJP menambahkan, sementara untuk ruas Pondok aren - Ulujami terdapat masalah lubang dan retak pada jalan, endapan dan penampang saluran drainase, lubang dan retak bahu jalan, patok kilometer dan penerangan jalan.

"Terakhir pada ruas JORR (E1,E2,E3) terdapat masalah lubang dan retak jalan, guardrail, kecepatan tempuh & jumlah antrian, rambu, marka jalan dan reflektor. Sementara itu hasil evaluasi SPM jalan tol untuk tahun 2019-2020 tidak dipublikasikan, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Sebab sejak tahun 2011 hingga semester I tahun 2018 laporan

ini secara rutin dipublikasikan," pungkas Suryadi.

Sebagai pengguna jalan tol, kata SJP, tentunya masyarakat berhak tahu hasil evaluasi SPM tersebut yang dijadikan dasar kenaikan tarif jalan tol.

"Fraksi PKS sendiri dalam beberapa kesempatan selalu berpendapat bahwa kenaikan tarif jalan tol belum saatnya dilakukan karena Indonesia masih dalam suasana krisis pandemi Covid 19, dimana sektor transportasi merupakan sektor yang paling terpuukul," tegasnya.

Selain itu, imbuahnya, dengan kondisi saat ini saja biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi, dimana menurut penelitian Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia tahun 2017 ongkos logistik Indonesia mencapai 23,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Thailand (13,2 persen), Malaysia (13 persen), dan Singapura (8,1 persen).

"Sedangkan kenaikan biaya logistik akan berpengaruh terhadap harga barang. Di mana pengguna barang-barang tersebut adalah masyarakat



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Anggota Komisi V DPR RI

"Fraksi PKS sendiri dalam beberapa kesempatan selalu berpendapat bahwa kenaikan tarif jalan tol belum saatnya dilakukan karena Indonesia masih dalam suasana krisis pandemi Covid 19, dimana sektor transportasi merupakan sektor yang paling terpuukul"

yang lebih luas yang saat ini juga sudah terpuukul tingkat konsumsinya," ujarnya.

Senada dengan pendapat PKS tersebut, katanya, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)

berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan tarif jalan tol berdampak langsung pada kegiatan ekonomi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tarif 7 Ruas Tol di Trans Jawa Resmi Naik

PKS : Batalkan kenaikan tarif tol karena **SPM*** belum memenuhi syarat dan membebani dunia usaha



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH 1

Ruas JORR Seksi W1, W2 Utara, W2 Selatan, S, E (Penjaringan-Rorotan) dan Akses Tanjung Priok

GOL I	Rp 15.000,-	→	Rp 16.000,-
GOL II	Rp 22.500,-	→	Rp 23.500,-
GOL III	Rp 22.500,-	→	Rp 23.500,-
Gol IV	Rp 30.000,-	→	Rp 31.500,-
Gol V	Rp 30.000,-	→	Rp 31.500,-

WILAYAH 2

Ruas Pondok Aren-Ulujami (Segmen Bintaro Viaduct-Pondok Ranji)

GOL I	Rp 3.000,-	→	Rp 3.000,-
GOL II	Rp 4.500,-	→	Rp 4.500,-
GOL III	Rp 4.500,-	→	Rp 4.500,-
Gol IV	Rp 6.000,-	→	Rp 6.500,-
Gol V	Rp 6.000,-	→	Rp 6.500,-

WILAYAH 3

Tarif Tol Palimanan-Kanci

GOL I	Rp 12.000,-	→	Rp 12.500,-
GOL II	Rp 15.000,-	→	Rp 18.000,-
GOL III	Rp 21.000,-	→	Rp 18.000,-
Gol IV	Rp 27.000,-	→	Rp 30.000,-
Gol V	Rp 32.000,-	→	Rp 30.000,-

WILAYAH 4

Tol Semarang Seksi A,B,C

GOL I	Rp 5.000,-	→	Rp 5.500,-
GOL II	Rp 7.500,-	→	Rp 8.000,-
GOL III	Rp 7.500,-	→	Rp 8.000,-
Gol IV	Rp 10.000,-	→	Rp 10.500,-
Gol V	Rp 10.000,-	→	Rp 10.500,-

WILAYAH 5.A

Tol Surabaya-Gempol

Sistem Terbuka (Dupak-Waru)

GOL I	Rp 3.000,-	→	Rp 5.000,-
GOL II	Rp 4.500,-	→	Rp 8.000,-
GOL III	Rp 6.000,-	→	Rp 8.000,-
Gol IV	Rp 7.500,-	→	Rp 10.500,-
Gol V	Rp 9.000,-	→	Rp 10.500,-

WILAYAH 5.B

Tol Surabaya-Gempol

Sistem Tertutup (Waru-Porong)

GOL I	Rp 4.500,-	→	Rp 9.000,-
GOL II	Rp 6.000,-	→	Rp 14.000,-
GOL III	Rp 9.500,-	→	Rp 14.000,-
Gol IV	Rp 12.000,-	→	Rp 18.500,-
Gol V	Rp 14.000,-	→	Rp 18.500,-

WILAYAH 5.C

Tol Surabaya-Gempol

Sistem Terbuka (Kejapanan-Gempol)

GOL I	Rp 3.000,-	→	Rp 3.000,-
GOL II	Rp 4.500,-	→	Rp 5.000,-
GOL III	Rp 4.500,-	→	Rp 5.000,-
Gol IV	Rp 6.000,-	→	Rp 6.500,-
Gol V	Rp 6.000,-	→	Rp 6.500,-

*Standar Pelayanan Minimal

Tekstil Impor Banjir

Politisi PKS : Pemerintah Senang Impor Ketimbang Produksi Sendiri

KUTIPAN

Jakarta (15/01) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menerima audiensi dari Pimpinan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) secara virtual pada Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Jum'at (15/10).

IKATSI melalui Fraksi PKS mengharapkan relaksasi impor untuk menambah kuota produk dalam negeri, diberlakukan pre border melalui pre shipment infection, evaluasi praktik importasi yang tidak sesuai prosedur, dan pembaharuan paradigma Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perindustrian dan Perdagangan agar lebih mementingkan industri manufaktur lokal guna mendorong investasi.

Merespons aspirasi para produsen tekstil, Fraksi PKS menyatakan siap meneruskan keluhan para aspirator kepada pemerintah.

"Sebagai wakil rakyat, kami senang menerima aspirasi

dari bapak-bapak semua, kami akan berusaha menyampaikan kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan untuk membuat regulasi dan juga mengecek regulasi-regulasi itu." ucap Amin.

Amin menambahkan pihaknya turut prihatin atas membludaknya produk-produk impor sementara anak bangsa mampu memproduksinya sendiri.

"Tentu yang membuat kami prihatin karena membanjirnya produk-produk impor, bahkan yang ironi adalah apa-apa yang bisa diproduksi di dalam negeri ternyata pemerintah masih senang impor, ini juga masalah yang

sering kami kritisi," ungkap Amin.

Anggota DPR RI Dapil Jatim IV tersebut menegaskan keberpihakan Fraksi PKS kepada pengusaha lokal dan mengapresiasi perjuangan IKATSI mengevaluasi kebijakan pemerintah.

"Kita bicara soal keberpihakan kepada para pengusaha dalam negeri. Tapi yang disampaikan itu bagus, kami banyak sekali yang dipikirkan dan dibahas, tapi dengan data-data detail ini ketika kami baca lagi insya Allah sangat berguna." pungkasnya.



Tentu yang membuat kami prihatin karena membanjirnya produk-produk impor, bahkan yang ironi adalah apa-apa yang bisa diproduksi di dalam negeri ternyata pemerintah masih senang impor, ini juga masalah yang sering kami kritisi



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

Raker Bersama Menteri
Koperasi dan UMKM

Rafli Minta Pemerintah Prioritaskan Bantu UMKM

KUTIPAN

Jakarta (21/01) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli, mengusulkan agar Pemerintah terus fokus memprioritaskan ekonomi rakyat,

terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sebagai bagian dari penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Rafli, gejala ekonomi yang baru, mulai muncul akibat virus corona sudah memukul UMKM.

"Gejalakan ekonomi karena pandemi saat ini, sudah memukul UMKM, untuk itu kita harapkan selain solusi

berkelanjutan terkait penyaluran bantuan bagi UMKM, kita juga meminta penambahan kuota bantuan UMKM" Ujarnya saat Rapat Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki di Jakarta, (21/01).

Rafli mengaku telah melihat langsung aktivitas UMKM di berbagai tempat, umumnya pelaku UMKM sangat terpuuk akibat pandemi yang dialami hampir satu tahun ini.

"Saya sudah melihat langsung bagaimana kondisi UMKM sekarang di daerah. Jadi, mencegah agar ribuan UMKM tidak sampai gulung tikar. Maka, program stimulus bantuan ekonomi untuk UMKM tahun ini harus diperbanyak lagi serta menyentuh ke semua sektor UMKM" kata Rafli.

Menurut dia, ditengah kondisi wabah covid-19 UMKM akan bisa bertahan dengan memperoleh bantuan.

"Hari ini kita kasih harus lebih dari sebelumnya, jangan tanggung - tanggung untuk



RAFLI
Anggota Komisi VI DPR RI

Gejolak ekonomi karena pandemi saat ini, sudah memukul UMKM, untuk itu kita harapkan selain solusi berkelanjutan terkait penyaluran bantuan bagi UMKM, kita juga meminta penambahan kuota bantuan UMKM

masyarakat, demi UMKM kita mampu bertahan ditengah wabah" Ucap politisi PKS dapi Aceh itu

Rafli menambahkan, saat ini kendala yang menjadi catatan adalah perlu adanya evaluasi program yang selama ini digulirkan selama ini produktif dan efektif beradaptasi dengan kondisi ditengah pandemi.

Pada kesempatan rapat kerja dengan Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut, Rafli juga mengusulkan adanya bantuan pembangunan dalam bentuk fisik, bagi pelaku UMKM.

"Kita mengapresiasi program yang tengah berjalan, kita berharap adanya bantuan pembangunan fisik bagi pelaku UMKM," ungkapnya.

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang berlangsung siang tadi, turut membahas, kegiatan realisasi anggaran tahun 2020, rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA tahun 2021, dan pelaksanaan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun anggaran 2021.

Aleg PKS: Pemerintah Harus Bantu Pertamina Hadapi Gugatan Trilunan Perusahaan AS

KUTIPAN

Jakarta (10/01) --- Terkait adanya gugatan Rp 39,5 dari Anadarko Petroleum Corporation kepada Pertamina, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah turun tangan

Mulyanto minta Pemerintah mencari tahu akar masalah sebenarnya, sehingga muncul gugatan dari perusahaan Amerika itu ke Pertamina.

Menurut Mulyanto kasus ini sangat besar dan serius sehingga perlu peran negara untuk membantu menyelesaikannya.

"Pemerintah wajib membantu Pertamina untuk berembung mencari solusi terkait soal gugatan dari perusahaan AS, Anadarko Petroleum Corporation terkait perjanjian impor 1 juta ton (MTPA) gas per tahun dalam jangka waktu 20 tahun dari Mozambik," terang Mulyanto.

Pertamina, imbuhnya, juga harus terbuka dan menjelaskan kepada publik soal gugatan

tersebut.

"Jangan ditutup-tutupi karena tuntutan itu tidak main-main yakni Pertamina harus membayar kerugian sebesar Rp 39,5 triliun kepada Anadarko akibat pembatalan jual-beli LNG tersebut pada Februari 2019," tegas Mulyanto dalam keterangannya selesai Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Selasa (19/01).

Terlepas dari siapa yang salah, kata Mulyanto, Pemerintah harus mengupayakan pembatalan gugatan material senilai hampir Rp 40 triliun itu. Mulyanto ingatkan Pemerintah bahwa saat ini Negara mengalami kekurangan uang sehingga gugatan itu harus diselesaikan dengan baik.

"Jangan sampai kita harus mengeluarkan kocek sebesar itu untuk sesuatu yang tidak perlu," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menambahkan, gugatan ini adalah pelajaran penting agar ke depan Pemerintah lebih akurat menyusun perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi. Jangan ada lagi salah hitung atau miss match.

"Seperti kasus listrik PLN yang over supply mendekati 60%, namun nyatanya kita masih saja bangun pembangkit dengan utang PLN yang mencapai Rp 500 triliun," jelas Mulyanto.

Perhitungan yang cermat juga perlu dilakukan dalam hal pengadaan LNG. Jangan sampai di saat produksi LNG surplus, sehingga memungkinkan ekspor, Pertamina malah mengimpor gas ini dalam jumlah besar.

"Logikanya tidak pas. Padahal diketahui, bahwa transaksi berjalan perdagangan migas kita terus tekor setiap tahun. Semestinya yang



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jangan ditutup-tutupi karena tuntutan itu tidak main-main yakni Pertamina harus membayar kerugian sebesar Rp 39,5 triliun kepada Anadarko akibat pembatalan jual-beli LNG tersebut pada Februari 2019

dilakukan bukanlah impor gas tetapi ekspor," tandasnya.

Secara umum, kata Mulyanto, strategi dasar kita adalah menggenjot lifting migas sehingga kita dapat lebih baik memenuhi kebutuhan migas domestik dan terus mengurangi impor migas, yang dengan itu

defisit transaksi berjalan migas dapat direduksi.

"Syukur-syukur kalau bisa surplus. Bukan malah memperbesar defisit transaksi berjalan melalui impor LNG," tandas politisi yang akrab dipanggil Pak Mul ini.

Raker Dengan Menteri ESDM Bahas Program Prioritas Tahun 2021, Rofik Berikan Sejumlah Catatan

KUTIPAN

Jakarta (20/01) ---
Komisi VII DPR RI
menggelar rapat
kerja bersama
Kementerian ESDM

pada Selasa (19/01) dengan
salah satu agenda pembahasan
terkait point-point strategis
Program Kerja Kementerian
ESDM Tahun 2021 dan Evaluasi
Kinerja KESDM 2020.

Dalam rapat kerja itu, Ke-
menterian ESDM mengungkap-
kan mempunyai beberapa pro-
gram prioritas di bidang migas
di tahun 2021. Antara lain
jargas rumah tangga (120.776
SR) dan konkit nelayan dan
petani (56.000 paket).

Anggota Komisi VII dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Rofik Hananto mengatakan san-
gkat mendukung pembangunan
jaringan gas (jargas) untuk
kepentingan ekonomi yang
mendukung kepada rumah
tangga, khususnya UMKM.

"Kami mendorong dan

akan mengawal program
pembangunan jargas untuk
kepentingan ekonomi yang
mendukung kepada rumah
tangga khususnya UMKM.
Karena pembangunan jargas ini
memberi solusi tersedianya
bahan bakar murah, aman dan
ramah lingkungan," kata Rofik.

Rofik menambahkan, har-
ga murah tentu menjadi vari-
abel positif bagi pelaku industri
dan rumah tangga dalam
bentuk jaringan gas. Sedangkan
belanja energi yang miring akan
signifikan mengurangi beban
pokok produksi.

"Untuk program bantuan
konkit buat nelayan dan petani,
kami minta program ini dapat
terus dijalankan karena
program ini mampu
meningkatkan kapasitas
produksi sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan
merek," katanya.

Sementara di bidang
Minerba, Kementerian ESDM
mempunyai program
Percepatan Pembangunan
Smelter tambahan 4 unit.
Terkait dengan hal ini, FPKS
mengkritisi progress
pembangunan smelter PT

Freeport Indonesia yang
bergerak sangat lambat dan
FKS menduga pihak PT
Freeport Indonesia tidak
bersungguh-sungguh dalam
proyek ini.

"Karena itu FKS meminta
pemerintah sebagai pemegang
saham PT Freeport Indonesia
agar berkomitmen lebih tegas,
misal dengan melakukan per-
gantian jajaran direksi sehingga
reschedule pelaksanaan
pembangunan smelter sesuai
rencana," kata Rofik.

Dalam evaluasi kinerja
Kementerian ESDM Tahun
2020, disebutkan, PNPB ESDM
melebihi target Rp 108,7 T,
120% dari target Rp 90,7 T.
Realisasi anggaran tertinggi
dalam 11 tahun terakhir.
Realisasi 94,1%, Rp 5,9 T dari
DIPA Rp 6,2 T. Menjaga
investasi ESDM USD 24,2 miliar.

"Kendati demikian, FPKS
tidak terlalu puas pada kinerja
ESDM tahun 2020. Karena
meskipun secara angka
over target, akan tetapi FPKS
mencatat output dan outcome
ESDM harusnya bisa lebih baik
dari sekarang bahkan berlipat
kali," kata legislator dari Dapil



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

"Kami mendorong dan akan mengawal
program pembangunan jargas untuk
kepentingan ekonomi yang mendukung
kepada rumah tangga khususnya UMKM.
Karena pembangunan jargas ini memberi
solusi tersedianya bahan bakar murah,
aman dan ramah lingkungan

Jawa Tengah VII itu.

Dia mengatakan, Fraksi
PKS menuntun kinerja ESDM
2021 lebih optimal lagi karena
potensi yang dimiliki sangat
besar dan regulasi sudah
sangat mendukung, terutama

dalam kinerja peningkatan
angka investasi.

"Kita sepakat bahwa SDA
adalah economic drive bagi
bangsa Indonesia saat ini,"
tuturnya.

7 Vaksin Covid-19 yang Dipakai di Indonesia

Berdasarkan surat keputusan MENKES.

Vaksin Untuk Rakyat, YES!

PKS Minta Pemerintah Pastikan Aman Terkendali.

● Pfizer

- Efikasi **95%**
- Jenis mRNA
- Suhu Penyimpanan -75° C
- Usia Pengguna 12- diatas 55 Tahun

● Moderna

- Efikasi **94,1%**
- Jenis mRNA
- Suhu Penyimpanan -20° C
- Usia Pengguna 12-18 Tahun

● Novavax

- Efikasi **79%**
- Jenis Vaksin nanopartikel protein perfusi
- Suhu Penyimpanan Belum diketahui
- Usia Pengguna 18-59 Tahun

● Sinopharm

- Efikasi **79%**
- Jenis Inaktivasi
- Suhu Penyimpanan 2-8° C
- Usia Pengguna 18-80 Tahun

● AstraZeneca

- Efikasi **70%**
- Jenis mRNA
- Suhu Penyimpanan 3-8° C
- Usia Pengguna 18-55 Tahun

● Merah Putih

- Efikasi Belum diketahui
- Jenis Berasal dari rekombinasi protein dari mamalia, vaksin berbasis DNA, RNA, dan adenovirus
- Suhu Penyimpanan Belum diketahui
- Usia Pengguna Belum diketahui

● Sinovac

- Efikasi di Indonesia **65,3%**
- Jenis Inaktivasi (mengan-dung virus dan bakteri yang sudah dimatikan)
- Suhu Penyimpanan 2-8° C
- Usia Pengguna 18-59 Tahun



Ansory Siregar : Perbaiki Komunikasi, Cabut Ancaman Denda Tidak Mau Di Vaksin

KUTIPAN

Jakarta (14/01) --- Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Ansory Siregar menekan Pemerintah untuk mencabut ancaman denda kepada masyarakat yang tidak ingin disuntikkan vaksin pada saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT. Biofarma

Menurut Ansory, memberi ancaman bukanlah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat mendukung vaksinasi Covid-19. "Tolong dihapus ancaman itu dari masyarakat, sebab walaupun didenda pada akhirnya tidak akan disuntik, kan tujuannya agar mereka mau disuntik. Sebenarnya kalau vaksin ini bagus pasti akan dicari orang berapapun harganya, sebaliknya jika vaksin ini tidak bagus harga gratis pun orang tidak akan mau. Nah ini kan kerja kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mensosialisasikannya," ucap

Ansory yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKS.

Ansory juga mengatakan seharusnya pemerintah menetapkan jadwal vaksin menunggu hasil uji klinis setidaknya beberapa minggu lagi agar tidak ada kontra yang timbul dari masyarakat, begitu pula EUA/Emergency Use Authorization atau ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM

"BPOM mempunyai hak untuk bertindak tegas kepada pemerintah jika uji EUA belum keluar, BPOM sudah dua kali memaparkan bahwa hasil uji klinis akan keluar lima belas hari sampai satu bulan lagi.

Seharusnya bukan Bapak Budi Gunadi yang menentukan vaksinasi tanggal tiga belas, tetapi yang menentukan vaksinasi seharusnya dari BPOM. Untuk ke depan kita semua harus mengikuti alur," tegas Ansory.

Terakhir Anshori juga mengusulkan agar UU Karantina direvisi agar tidak ada sanksi yang tidak produktif. Terlebih dalam situasi pandemi, kondisi masyarakat tidak memungkinkan



H. ANSORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



"Tolong dihapus ancaman itu dari masyarakat, sebab walaupun didenda pada akhirnya tidak akan disuntik, kan tujuannya agar mereka mau disuntik. Sebenarnya kalau vaksin ini bagus pasti akan dicari orang berapapun harganya, sebaliknya jika vaksin ini tidak bagus harga gratis pun orang tidak akan mau. Nah ini kan kerja kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mensosialisasikannya

Tenaga Kesehatan Terus Berguguran

Mufida: Hak Kesehatan Nakes Masih **Belum** Terpenuhi

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Jumlah tenaga Kesehatan yang gugur akibat covid-19 terus bertambah

Sepanjang Maret sampai Desember 2020 tenaga medis yang meninggal dunia akibat terpapar covid-19 berdasarkan data Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencapai 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat tersebut terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, 10 tenaga laboratorium medik.

Dari kalangan dokter, 237 yang wafat terdiri dari 131 dokter umum (4 diantaranya guru besar), 101 dokter spesialis (9 guru besar), serta 5 residen. Jumlah ini menjadikan Indonesia yang tertinggi di Asia dalam kehilangan tenaga medis akibat pandemi covid-19 dan ke-5 tertinggi di dunia.

Padahal dalam data yang

dirilis Amnesty International pada September 2020, Indonesia masih berada di peringkat ke-10 dunia dan ke-2 di Asia dengan jumlah kematian tenaga medis yang jauh lebih kecil dari India.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Economic, Social and Cultural Rights yang diselenggarakan oleh Amnesty International Indonesia menyatakan gugurnya ratusan tenaga medis ini adalah sebuah kehilangan yang besar bagi bangsa ini. Apalagi 13 diantaranya adalah guru besar bidang kedokteran dan 101 adalah dokter spesialis.

"Kehilangan besar ini diantaranya adalah akibat tidak terpenuhinya hak kesehatan dari tenaga medis ini dalam berjuang menangani covid-19 dalam bentuk kurang tersedianya Alat Pelindung Diri," terang Mufida dalam tambahan keterangan, Rabu (20/01).

Mufida menekankan, jaminan penyediaan APD adalah amanat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Pada pasal 57 di huruf (d) disebutkan bahwa salah satu hak tenaga medis dalam menjalankan tugasnya adalah memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesucilaan, serta nilai-nilai agama.

"Amnesty International pada September pernah merilis data yang menyebutkan 7000 lebih tenaga medis yang meninggal dunia akibat covid-19 dengan tertinggi di Meksiko (1320), Amerika Serikat (1077), Inggris (649), Brazil (634) dan Rusia (631). Sementara pada akhir Desember, The Guardian menyebutkan lebih dari 2900 pekerja medis di Amerika yang gugur akibat covid-19," papar Mufida.

Mufida pada kesempatan FGD yang juga diikuti beberapa aktivis di berbagai bidang juga mengatakan tenaga medis adalah bagian dari masyarakat yang hak kesehatannya dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 A UUD NKRI 1945 jelas menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

“Jaminan penyediaan APD adalah amanat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 57 di huruf (d) disebutkan bahwa salah satu hak tenaga medis dalam menjalankan tugasnya adalah memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesucilaan, serta nilai-nilai agama.”

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya Pasal 28H juga menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan apalagi dengan tugas mulianya di masa pandemi, maka para tenaga medis ini yang harus diprioritaskan pemenuhan hak kesehatannya, khususnya APD.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Vaksinasi Mulai Dilakukan,

Netty: Bukan Berarti Boleh Lepas Kendali dan Tak Jalankan Prokes

KUTIPAN

Jakarta (16/01) --- Menyikapi telah dilakukannya vaksinasi terhadap Presiden, sejumlah pejabat dan tokoh publik, Netty Prasetyani, Anggota Komisi IX DPR RI mengingatkan bahwa vaksin bukan senjata pamungkas untuk menurunkan angka positif Covid-19.

"Saya perlu mengingatkan pada Pemerintah dan masyarakat bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menurunkan angka kasus Covid-19," ungkap Netty dalam rilis medianya, Jumat (15/01/2021).

Menurut Netty, program vaksinasi baru dilakukan secara amat terbatas pada segelintir orang. Vaksin jadi siap pakai pun baru tersedia 3 juta dosis Coronavax produksi Sinovac yang mendapat EUA dari BPOM tanggal 12 Januari.

"Jadi, siapa pun yang telah divaksin, apalagi tokoh publik, harus menahan diri. Jangan sampai jadi salah kaprah, seolah setelah divaksin boleh

bebas, lepas kendali dan tidak melaksanakan prokes," tegas Netty.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus memberikan edukasi pada masyarakat agar memahami situasi ini dan tetap disiplin prokes.

"Pelibatan tokoh publik dan influencer dalam vaksinasi tahap awal adalah untuk mendukung penanganan pandemi, bukan malah membuat ambayar," kata Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.

Ia pun meminta pemerintah agar terus meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui penguatan prokes, disiplin 3T

dan 3M.

"Sarpras kesehatan dan kesiapan faskes tingkat pertama harus ditingkatkan dalam penanganan penyakit katastropik sehingga dapat meminimalisir rujukan pasien ke RS yang sudah kewalahan menangani pasien Covid-19," katanya.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memberikan dukungan pada hasil inovasi alat kesehatan produksi dalam negeri, seperti Genose.

"Manfaatkan dan beri dukungan pada hasil inovasi dalam negeri, seperti Genose, guna mempercepat proses 3T. Kita perlu membangun kemandirian bangsa dengan memberikan apresiasi pada karya anak negeri," ujarnya.

Terkait mekanime distribusi vaksin, Netty meminta pemerintah agar memastikan mekanime distribusi vaksin dilakukan secara aman, tepat sasaran dan tercurupi sebagaimana yang telah ditentukan.

"Pemerintah harus menjamin kesiapan mekanime distribusi dan manajemen



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah harus menjamin kesiapan mekanisme distribusi dan manajemen vaksin termasuk sarana prasarana dan logistik rantai dingin yang sesuai standar. Harus bisa dipastikan kesiapan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas fasyankes dan tenaga vaksinator dalam menjalankan vaksinasi"

vaksin termasuk sarana prasarana dan logistik rantai dingin yang sesuai standar. Harus bisa dipastikan kesiapan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas fasyankes dan tenaga vaksinator dalam menjalankan vaksinasi" kata Netty.

Terkait penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) Netty meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Dihadapan Mendikbud, Fikri Faqih **Desak** **Penyelesaian Masalah** Guru Honorer

KUTIPAN

Jakarta (21/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk segera menyelesaikan masalah guru dan tenaga kependidikan honorer.

“Secara sistematis harus diselesaikan, pendidikan kita tidak akan jalan bila masalah guru masih berlarut,” katanya di depan Mendikbud RI Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X yang digelar virtual, Rabu (20/01/2021).

Menurut Fikri, guru merupakan pilar pendidikan yang menopang sistem pendidikan Nasional RI, sehingga negara harusnya berhutang jasa pada para guru.

“Faktanya, negara telah memanfaatkan tenaga honorer untuk pendidikan, namun tidak diperhatikan nasibnya, dan sekarang ketika mereka menuntut status, pemerintah mengulur terus,” ucap politisi PKS ini.

Fikri menambahkan, sesungguhnya bila mau diringkas, problem pendidikan di Indonesia hanya dua macam. “Yakni guru dan sarana prasana Pendidikan,” imbuhnya.

Istilah terkait guru, lanjut Fikri, akan terus ramai karena jumlahnya yang sangat banyak belum terselesaikan hingga sekarang.

“Dari beberapa RDP di komisi X, permasalahan guru harus selesai, terutama di sekolah negeri, karena merupakan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Fikri juga mengingatkan, penyelesaian guru juga harus mencakup satuan pendidikan swasta, dimana ada status guru tetap (yayasan) dan tidak tetap

yang jumlahnya jauh lebih banyak.

“Jadi tidak boleh ada satupun guru di negeri ini yang tidak jelas statusnya, kesejahteraannya, dan jaminan sosialnya,” pungkas dia.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjawab bahwa tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi PPPK tanpa seleksi.

“Mengangkat ASN tidak mungkin tanpa seleksi, kita harus mematuhi UU ASN, karena tidak hanya melanggar UU, tapi juga melanggar etika kita kepada murid-murid, untuk mendapatkan kompetensi minimum dari kualitas gurunya,” kata Nadiem.

Namun disisi lain, Nadiem juga merespon perihal bagaimana memprioritaskan guru honorer yang sudah punya pengalaman lebih lama. Dia menyatakan, pada seleksi khusus untuk honorer diberikan dua keistimewaan.

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Secara sistematis harus diselesaikan, pendidikan kita tidak akan jalan bila masalah guru masih berlarut. guru merupakan pilar pendidikan yang menopang sistem pendidikan Nasional RI, sehingga negara harusnya berhutang jasa pada para guru

Legislator PKS: Pemerintah **Harus Terbitkan Kepres** Pengangkatan Guru Honorer Tanpa Tes

KUTIPAN

Palu (20/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmasi, bagi para guru honorer yang telah lama mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut ditegaskan disela-sela Rapat Dengar Pendapat, Senin, (18/01/2021).

"Guru honorer yang usianya sudah lebih dari 35 tahun, guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru honorer yang sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun harus menjadi perhatian pemerintah. Mereka para guru honorer dengan kriteria ini seharusnya langsung diangkat menjadi PNS melalui Keputusan Presiden tanpa tes," ungkap Sakinah.

Sakinah pun menambahkan bahwa para guru honorer banyak yang sudah mengabdikan

selama sepuluh, lima belas tahun bahkan ada yang lebih dari itu.

"Atas pengabdian para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa harus diberikan apresiasi oleh pemerintah," pungkasnya.

Legislator PKS asal Sulawesi Tengah ini pun mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan guru honorer dan menjadikannya prioritas.

"Saya berangkat dari guru

honorer, jadi saya pun bisa merasakan bagaimana dan apa yang dirasakan oleh para guru honorer yang mengadukan nasibnya. Persoalan guru honorer harus segera tuntas dan harus menjadi prioritas," ujarnya.

Pemerintah harus segera hadir, mempertimbangkan lama pengabdian guru yang bertahun-tahun mengabdikan patut diapresiasi dengan kebijakan afirmasi. Tidak perlu lagi tes, ujian sesungguhnya bagi mereka telah dilalui bertahun-tahun lamanya.

"Terlebih guru honorer yang mengabdikan di daerah 3T, bahkan guru honorer yang mengajar berbagai mata pelajaran karena kekurangan guru. Di masa pandemi ini mereka harus rela datang dari rumah ke rumah untuk mendidik murid," pungkas Sakinah.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

"Guru honorer yang usianya sudah lebih dari 35 tahun, guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru honorer yang sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun harus menjadi perhatian pemerintah. Mereka para guru honorer dengan kriteria ini seharusnya langsung diangkat menjadi PNS melalui Keputusan Presiden tanpa tes,

Ledia Ingatkan Menparekraf Soal Peningkatan Kualitas SDM Wisata

KUTIPAN

Jakarta (15/01) --- Dalam raker perdana dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, anggota komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan beberapa masukan diantaranya soal perlunya perhatian Kemenparekraf mengusahakan peningkatan kualitas SDM lulusan sekolah pariwisata

“Untuk SMK Pariwisata misalnya banyak lulusannya yang dikeluarkan tidak memiliki keterampilan memadai untuk bekerja di bidang terkait pariwisata. Seperti kurang tersiapkan untuk bergiat di ranah kerja.” Kata Ledia

Keluhan semacam itu kata Ledia kerap diterimanya dalam berbagai pertemuan di dapil maupun daerah daerah pada masa kunjungan kerja, saat bertemu dengan dinas pariwisata di daerah, lembaga-lembaga maupun perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata.

“SMK ini kan berada di

bawah Ditjen Vokasi Kemdikbud, dan bidang vokasi ini kita pahami sebagai lingkup pendidikan yang lebih banyak menitikberatkan kegiatan ajar mengajarnya dengan praktek keterampilan daripada teori. Kalau sampai ada keluhan soal rendahnya kualitas kelulusan mereka tentu ada yang harus diperbaiki dan perlu menjadi perhatian Kemenparekraf.” Lanjut Ledia

Untuk itu aleg Fraksi PKS ini mengusulkan agar pihak Kemenparekraf menguatkan koordinasi dengan pihak Kemendikbud agar sekolah sekolah pariwisata ini bisa

membuat satu standar kelulusan minimum yang berkesesuaian dan diperlukan dengan ranah kerja bidang pariwisata.

“Standar minimum ini penting supaya lulusan SMK ini bisa siap pakai, siap kerja di bidangnya. Kalau bisa bahkan ada koordinasi juga dengan dunia usaha dunia industri agar bisa tepat pula standarnya.”

Selain itu, Ledia juga mengingatkan betapa mahasiswa di kampus-kampus pariwisata seperti kurang perhatian, utamanya soal dukungan untuk mendapatkan beasiswa. Padahal lulusan kampus pariwisata ini dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Pariwisata yang sayangnya jumlahnya masih sedikit.

Adanya dorongan kemudahan beasiswa tentu akan bisa membantu peningkatan jumlah mahasiswa. Sebab selama ini banyak calon mahasiswa yang punya peminatan berkuliah di kampus pariwisata tetapi terhambat biaya.

“Kampus pariwisata di bawah naungan Kemenparekraf

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.**

Anggota Komisi X DPR RI

“SMK ini kan berada di bawah Ditjen Vokasi Kemdikbud, dan bidang vokasi ini kita pahami sebagai lingkup pendidikan yang lebih banyak menitikberatkan kegiatan ajar mengajarnya dengan praktek keterampilan daripada teori.

Kalau sampai ada keluhan soal rendahnya kualitas kelulusan mereka tentu ada yang harus diperbaiki dan perlu menjadi perhatian Kemenparekraf

semestinya bisa menjadi pilot project penghasil lulusan yang kompeten dengan merekrut siswa dari berbagai daerah didukung dengan pemberian beasiswa. Untuk keperluan

tersebut tentu saja Kemenparekraf juga perlu berkoordinasi dengan Kemenkeu agar bisa mengalokasikan lebih banyak peluang beasiswa tersebut.”

Mustafa Kamal: Pembinaan Karakter Atlet Penting Dilakukan **Bukan Hanya Jasmani**

KUTIPAN

Jakarta (14/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyoroti kasus yang memprihatinkan dunia olahraga tanah air baru-baru ini, yaitu hukuman yang diberikan oleh Federasi Badminton Dunia (BWF) kepada delapan pemain bulu tangkis Indonesia setelah dinyatakan terbukti mengatur hasil pertandingan.

Dikutip dari BBC News, hukuman yang dijatuhkan mulai dari larangan bermain dari tujuh tahun hingga seumur hidup, sampai denda antara US\$3.000 dan US\$12.000.

Mustafa menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI secara virtual pada Kamis (14/01/2021).

"Kasus ini tentu memprihatinkan, salah satu cabang olahraga unggulan kita yang seharusnya menjadi kebanggaan, tumpuan harapan

kita, ada peristiwa yang terjadi dan baru diputuskan, BWF menjatuhkan hukuman ke 8 pemain bulu tangkis Indonesia", jelas Mustafa.

Lebih lanjut Mustafa menekankan kasus ini agar menjadi evaluasi semua pihak. Mustafa berharap Menpora beserta jajarannya dapat memantau dan mengklarifikasi kebenaran kasus ini, serta tetap memperhatikan nasib atlet yang terkena sanksi tersebut.

"Kasus ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Mohon Menpora beserta jajarannya

untuk memantau situasi ini, bagaimana implementasi di lapangan. Klarifikasi seberapa jauh kebenarannya. Bagaimana nasib kedepan bagi pembinaan atlet-atlet seperti ini. Mereka bagian dari pemuda dan pemuda Indonesia", lanjut Mustafa.

Ke depan, Mustafa meengajak semua pihak untuk melakukan pembinaan atlet bukan hanya jasmaninya, tapi menekankan juga pada karakternya.

"Mari sama-sama kita lakukan pembinaan atlet. Penting evaluasi dan tindak lanjut ke depan bagaimana. Pembinaan karakter di kalangan atlet penting ditekankan ke depan, bukan hanya jasmaninya saja. Buat apa prestasi sehebat apapun, tetapi terlibat dalam praktek yang melanggar moral seperti ini, jauh dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, ada ke-Timuran, tentu saja ini akan merusak dunia keolahragaan kita", ujar Mustafa.

Terakhir, Mustafa mengajak rekan-rekan di Komis X DPR RI agar lebih



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Komisi X DPR RI

"Kasus ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Mohon Menpora beserta jajarannya untuk memantau situasi ini, bagaimana implementasi di lapangan. Bagaimana nasib kedepan bagi pembinaan atlet-atlet seperti ini. Mereka bagian dari pemuda dan pemuda Indonesia"

perhatian terhadap perkembangan dunia olahraga Indonesia, khususnya cabang-cabang unggulan.

"Ini juga menjadi perhatian bagi rekan-rekan di Komisi X DPR RI. Mari kita sama-sama membina, mengayomi,

memperhatikan, memantau semua perkembangan dunia keolahragaan kita. Apalagi di cabang-cabang unggulan.

Jangan sampai kejadian seperti ini memalukan Bangsa kita kedepan", pungkas Mustafa.

RDP dengan AFPI, Anis Ingatkan Fintech Sehat untuk Akses ke Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (16/01) — Komisi XI DPR RI melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan AFPI (Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia) pada Kamis (14/01/2021) di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.

AFPI merupakan organisasi yang mawadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia.

AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Dalam rapat dengan topik Masukan Mengenai Financial Technology di Indonesia ini, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatannya.

Catatan pertama yang disampaikan Anis, terkait dengan tugas dan fungsi AFPI. Anis menyoroti keberadaan AFPI yang langsung ditunjuk oleh OJK untuk menjembatani, memberikan edukasi, dan

mendorong agar FinTech yang bermunculan di tengah masyarakat mendaftar di OJK.

"Selain itu, AFPI memiliki tugas terkait dengan perlindungan konsumen. Sementara itu, OJK juga memiliki Satgas Waspada Investasi yang sudah banyak membekukan FinTech sampai sekitar 2000 an," ungkapnya.

Dengan kondisi ini, Anis meminta agar korelasi, sinergi dan fungsi dari AFPI dan Satgas Waspada Investasi, perlu diperjelas.

Menyampaikan catatan keduanya, ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini mengungkap fakta di tengah masyarakat terkait dengan FinTech dan Pinjol (Pinjaman Online).

Anis menyatakan bahwa

tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Jarak diantara mereka yang berfikir panjang dan tidak menggali informasi lebih banyak tentang tawaran pinjaman yang diberikan.

"Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan kemudahan akses. Termasuk dalam memanfaatkan pinjaman online yang penawarannya dilakukan dengan akses yang sangat mudah yaitu melalui sms dan telepon," ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Anis meminta, AFPI melakukan tugasnya lebih massif dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dari pinjol yang seringkali merugikan.

"Disinilah peran AFPI melindungi konsumen dari ketidak-tahuan terhadap FinTech yang ilegal atau Pinjol tadi. Jangan sampai FinTech ilegal tersebut memanfaatkan ketidak-tahuan masyarakat," ujar Anis.

Selanjutnya, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyampaikan pandangannya terkait potensi yang dimiliki AFPI yang menurutnya bisa dioptimalkan.

Menurut Anis, FinTech



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"AFPI diharapkan melakukan tugasnya lebih massif dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dari pinjol yang seringkali merugikan. Disinilah peran AFPI melindungi konsumen dari ketidak-tahuan terhadap FinTech yang ilegal atau Pinjol tadi. Jangan sampai FinTech ilegal tersebut memanfaatkan ketidak-tahuan masyarakat

yang berkumpul di AFPI, dapat melakukan langkah-langkah besar apalagi di masa pandemi ini.

"Disaat pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan kegiatan tatap muka, FinTech bisa memanfaatkan akses digital untuk melakukan aktivitas dengan

masyarakat," ungkapnya.

Banyaknya kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana untuk permodalan terutama kalangan UMKM, imbuhnya, seharusnya dijadikan peluang pengembangan FinTech yang sehat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: **Stop Kenaikan** Tarif Tol Ditengah Pandemi

KUTIPAN

sektor logistik barang dan jasa akan terkena dampak dari naiknya tarif tol ini, ongkos operasional kendaraan logistik akan semakin memberatkan. Selain itu kenaikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada penyesuaian tarif transportasi umum antar kota yang dapat memberatkan masyarakat.

Jakarta (18/01) — Kenaikan tarif tol di beberapa ruas jalan tol resmi diberlakukan Minggu (17/1/2021). Penyesuaian tarif baru tersebut dilakukan dalam rangka menjamin para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk meningkatkan pelayanan dan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menyayangkan kenaikan tarif tol di masa pandemi dan perlu dikaji kembali untuk dilakukan penundaan atau pembatalan.

"Kurang tepat naiknya tarif tol di saat kondisi pandemi, kenaikan ini tentu akan berpengaruh pada beberapa

sektor. Jadi jangan dilihat dari sudut pandang investasi saja, tapi kondisi ekonomi termasuk pengaruhnya terhadap biaya logistik kebutuhan pokok dan biaya transportasi umum" ujar Junaidi dalam keterangan tertulis, Selasa, (19/01).

Legislator Fraksi PKS ini melanjutkan, sektor logistik barang dan jasa akan terkena dampak dari naiknya tarif tol ini, ongkos operasional kendaraan logistik akan semakin memberatkan. Selain itu kenaikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada penyesuaian tarif transportasi umum antar kota yang dapat memberatkan masyarakat.

Perlu diketahui, ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif baru diantaranya adalah, Tol JORR ruas E1, E2, W2U, S, dan ATP, Tol JORR ruas Pondok Aren Bintaro - Ulujami, Tol Surabaya - Gempol, Tol Waru - Porong, Tol Kejapanan - Gempol, Tol Palimanan - Kanci, Tol Kanci - Pejagan, Tol Pejagan - Pemalang, Tol Cipularang, dan Tol Padaleunyi.

Junaidi mengatakan, meski operator jalan tol berhak untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai regulasi yang ada, namun kebijakan ini kurang memperlihatkan kondisi ekonomi.

"Jika digabungkan pada suatu alur kebutuhan, kenaikan tol setidaknya dapat berdampak pada kenaikan biaya logistik barang dan jasa transportasi, lalu dapat meningkatkan harga barang kebutuhan masyarakat dan dapat mempengaruhi daya beli" tutup Junaidi.



Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Kurang tepat naiknya tarif tol di saat kondisi pandemi, kenaikan ini tentu akan berpengaruh pada beberapa sektor. Jadi jangan dilihat dari sudut pandang investasi saja, tapi kondisi ekonomi termasuk pengaruhnya terhadap biaya logistik kebutuhan pokok dan biaya transportasi umum"

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Anggota Baleg FPKS Tetap Keberatan atas RUU BPIP yang Dimasukkan dalam Prolegnas

KUTIPAN

Jakarta (18/01) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan Fraksinya tetap keberatan jika RUU BPIP dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021

Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi RUU BPIP ini dibahas ditengah pandemi Covid. Kita perlu fokus pada RUU yang terkait dengan penanggulangan Covid-19.

"Dalam Raker Baleg DPR, DPD dengan Menkumham, Baleg sepakat RUU HIP, yang merupakan inisiatif DPR, dicabut dari Prolegnas Prioritas tahun 2021," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Selanjutnya, ungkap Mulyanto, Pemerintah mengusulkan RUU BPIP untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah 2019-2024 dan dalam prolegnas prioritas tahun 2021.

Dengan melampirkan draft RUU serta naskah akademisnya.

"Terhadap RUU BPIP, seba-

gai usulan dari Pemerintah ini, fraksi PKS DPR RI keberatan dan meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali," jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI.

Fraksi PKS membuat catatan kritis terhadap RUU BPIP itu, diantaranya meminta Pemerintah tidak memasukkan pasal-pasal yang kontroversial dalam masyarakat, seperti tentang trisila, ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan serta tafsir tunggal atas Pancasila.

Selain itu Fraksi PKS minta TAP MPR No. 25 tentang Larangan Komunisme dimasukkan menjadi dasar dalam RUU BPIP tersebut.

"Karena kita tengah fokus dalam penanggulangan Covid-19, RUU yang tidak mendesak

seperti RUU BPIP ini agar dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah, mengingat kemampuan DPR menyelesaikan legislasi per tahun juga terbatas," tegas Mulyanto.

Fraksi PKS menekankan kalau pun Pemerintah ingin menjadikan RUU BPIP ini sebagai UU maka isi harus terbatas pada kelembagaan BPIP saja dan tidak mengatur norma lain di luar itu.

Selain itu, mengingat MPR juga mempunyai tugas mensosialisasikan 4 pilar termasuk Pancasila, maka secara kelembagaan BPIP harus bekerja sama dengan MPR.

"Kemudian, kelembagaan BPIP diharap tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan membuat tafsir tunggal yang monolitik atas Pancasila," imbuh Mulyanto.

Politisi senior PKS itu mendorong Pemerintah tidak memonopoli tafsir butir-butir Pancasila. Tafsir Pancasila harus tetap terbuka dan lebih ditekankan pada aspek pengamalan dalam kehidupan seha-



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Dalam praktek konglomerasi kepemilikan lahan, belakangan ini telah terjadi penunggakan pembayaran pajak dan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Tentu ini berdampak pada pendapatan dan belanja negara,

ri-hari berbangsa dan bernegara. Pancasila jangan sekedar dijadikan wacana atau alat bagi rezim untuk memukul kelompok masyarakat yang berbeda.

"Kita menginginkan Pancasila ini menjadi inspirasi

dalam upaya bersama meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan Indonesian bangsa yang unggul di tengah peradaban global," tandas Mulyanto.



PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat Milad

H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

23 Januari 1965 - 23 Januari 2021

Semoga senantiasa diberi
kesehatan dan keberkahan
dalam usianya

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Aleg PKS Beri Bantuan pada Warga Kampung Ciselang dengan Membangun Masjid

KUTIPAN

Tasikmalaya (19/01) — Antusiasme dan rasa syukur warga Kampung Ciselang Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya terwujud dalam bentuk gotong royong berpartisipasi memperbaiki Masjid Misbahussalimin Jabal Haddad, Sabtu (16/01/2021).

Antusiasme kegembiraan warga yang telah lama memperjuangkan perbaikan Masjid, diketahui oleh Toriq Hidayat, Anggota DPR RI asal PKS.

Toriq bersama Struktur PKS di Kecamatan Kadipaten mengunjungi lokasi sekaligus bersilaturahmi dengan Tokoh masyarakat disana.

“Masjid warga di kampung Ciselang ini memang harus diperbaiki, kondisinya selain sudah tidak layak juga luasnya pun tidak bisa mengakomodir jumlah jamaah semakin yang banyak,” ungkap Toriq.

Politisi PKS yang juga Tokoh Ulama di Kabupaten

Tasikmalaya ini turut memberikan bantuan untuk perbaikan Masjid warga Kampung Ciselang.

“Bantuan diberikan dalam bentuk 40 sak semen dan batu untuk pengecoran masjid,” tuturnya.

Tokoh Kampung Ciselang yang mewakili warga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk pembangunan Masjid Misbahussalimin Jabal Haddad.

Warga mengatakan, masjid selalu digunakan warga untuk salat berjamaah lima waktu dan kegiatan lainnya.

“Selain dipakai salat

berjamaah lima waktu, masjid ini juga digunakan untuk pengajian anak-anak setiap hari, pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak tiap minggu, dipakai untuk tarawih setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah saya atas nama warga Kampung Ciselang mengucapkan terima kasih atas bantuannya untuk menjadikan Masjid kami lebih layak,” ungkapnya.

Toriq Hidayat mengungkapkan, pembangunan masjid diperkirakan akan selesai sebelum datangnya bulan Ramadan sehingga seluruh kegiatan shalat berjamaah di bulan puasa nanti dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah hari ini pembangunan masjid warga sudah berjalan. Insya Allah terus berjalan dan selesai sebelum Ramadan. Mohon doanya semoga proses pembangunan ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT, hingga selesai,” ungkapnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Masjid warga di kampung Ciselang ini memang harus diperbaiki, kondisinya selain sudah tidak layak juga luasnya pun tidak bisa mengakomodir jumlah jamaah semakin yang banyak



Kunjungi Dapil, Hermanto Tinjau Penerima Bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik Berprestasi

KUTIPAN

Padang (19/01) — Anggota DPR RI Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Hermanto, dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan

berkesempatan mengunjungi kelompok tani Aliran Batang Suliti yang berhaluan pupuk organik, Jorong Sungai Ari Sawah laweh, Nagari Persiapan Pakan Rabaa Selatan, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.

Kelompok ini dipandang berhasil mengelola program unit pengolahan pupuk organik (UPPO) yang diterimanya tahun 2019.

"Saya memberikan apresiasi kepada kelompok tani Aliran Batang Suliti yang sejauh ini berhasil mengelola bantuan negara berupa program UPPO. Saya berharap prestasi ini dipertahankan bahkan ditingkatkan," ujarnya.

Apresiasi itu diberikan setelah melihat sendiri pupuk organik yang dihasilkan dan jumlah sapi yang sudah bertambah. Pupuk organik yang dihasilkan dijual ke anggota

kelompok dan bukan anggota kelompok. Untuk anggota dijual Rp. 12 ribu per karung. Untuk bukan anggota dijual Rp. 20 ribu per karung.

"Kelompok melaporkan telah berhasil menjual pupuk organik senilai Rp. 1,35 juta. Sedangkan jumlah sapi bertambah 2 kali lipat, semula 8 ekor menjadi 16 ekor," ungkap Hermanto.

Lebih jauh Hermanto menjelaskan, dana Program UPPO ini berasal dari negara. Ini berarti, kelompok penerima UPPO dipercaya untuk menjalankan tugas negara.

"Penerima program UPPO ditargetkan menjadi produsen pupuk organik yang bahan baku utamanya adalah kotoran sapi. Dengan pupuk organik ini diharapkan tanah pertanian di kawasan tersebut terjaga kesuburannya," papar legislator FPKS ini.

"Sejauh ini Kelompok Aliran Batang Suliti berhasil menjalankan target tersebut," ucap Hermanto.

Selain bisa mencapai target utama berupa produksi pupuk organik, kata Hermanto, kelompok ini juga mendapatkan bonus berupa tambahan 8 ekor sapi karena serius mengelola program UPPO.

"Anak-anak sapi yang lahir itu bisa dijual sebagai tambahan penghasilan bagi yang merawatnya," jelasnya. Keberhasilan tersebut mengindikasikan bahwa kelompok ini kompak dan semangat.

"Kalau kelompok kompak, semangat, disiplin dan sabar maka saya yakin program UPPO ini akan bisa mensejahterakan semua anggotanya", pungkas legislator Anggota Komisi IV DPR ini.

Hadir mendampingi Hermanto dalam kegiatan ini Ketua DPD PKS Ari Hendratno, anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Dedi Arisandi dan tokoh muda setempat Effendi Muharram.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Saya memberikan apresiasi kepada kelompok tani Aliran Batang Suliti yang sejauh ini berhasil mengelola bantuan negara berupa program UPPO. Saya berharap prestasi ini dipertahankan bahkan ditingkatkan

Bencana Banjir di Warureja Kabupaten Tegal, Fikri Faqih Salurkan Bantuan

KUTIPAN

Kabupaten Tegal (19/01) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyalurkan bantuan untuk korban banjir bandang di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, Selasa (19/1).

"Kami mendapat informasi dari kader PKS di lapangan yang segera membentuk posko bantuan dan dapur umum," kata Fikri dari Semarang.

Bantuan diserahkan legislator dari daerah pemilihan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes ini melalui kader-kader di lapangan, yakni Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPD) PKS Kabupaten Tegal kepada masyarakat terdampak banjir.

"Bantuan berupa paket sembako diberikan kepada ratusan kepala keluarga yang terdampak, disamping relawan PKS membantu membersihkan rumah warga korban banjir," kata Fikri.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal terpilih,

Arif Budiono menyatakan aksi ini merupakan kegiatan rutin oleh kader-kader PKS di lapangan, yang cepat tanggap setiap ada bencana.

"Kegiatan sosial ini menjadi aksi pertama DPD PKS Kabupaten Tegal di awal tahun, dan di awal kepengurusan yang baru terbentuk," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Tegal ini menambahkan, banjir yang disebabkan oleh luapan sungai Rambut di Kecamatan Warureja telah merendam setidaknya empat desa dan 200 Ha area persawahan.

"Desa yang terdampak, yakni Desa Sokareja, Kedungkelor, Banjaragung dan Kendayakan," jelasnya.

Menurut Arif, DPD PKS Kabupaten Tegal telah membangun posko dapur

umum, dan menyalurkan 9 truk air bersih kepada warga yang membutuhkan.

"Dapur umum ini telah menyebarkan 2000 nasi bungkus, dan sumbangan dari para kader telah disalurkan dalam bentuk pakaian, selimut, dan kebutuhan pokok," katanya.

Selain itu, para relawan PKS bekerja bakti Bersama masyarakat untuk membersihkan lumpur sisa banjir yang menutupi Sebagian rumah warga.

"Banjirnya surut sekitar 4 jam, tapi menyisakan lumpur yang menutupi jalan dan rumah," urai dia.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

"Bantuan berupa paket sembako diberikan kepada ratusan kepala keluarga yang terdampak, disamping relawan PKS membantu membersihkan rumah warga korban banjir"



Kungker ke Lokasi Longsor Sumedang

Aleg PKS Salurkan Bantuan dan Tanam Pohon

KUTIPAN

Sumedang (15/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi bersama Pimpinan dan Sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Lokasi Bencana Longsor Sumedang, di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang pada Jum'at (15/01).

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian terkait dan Wakil Bupati Sumedang serta jajaran Muspida Kabupaten Sumedang.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhasan beserta rombongan mendengarkan paparan terkait penyebab, akibat, dampak dan langkah antisipasi kemungkinan bencana longsor susulan, serta merekomendasikan beberapa point evaluasi dan tindak lanjut hasil tinjauan lapangan.

"Semoga dengan bantuan

ini bisa sedikit membantu dan pemerintah daerah bersama masyarakat bisa segera pulih dan melakukan rehabilitasi dampak bencana tersebut serta melakukan langkah antisipasi kemungkinan longsor susulan", ungkap Nurhasan.

Nurhasan menambahkan pihaknya berharap Pemerintah baik pusat dan daerah serius dan segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang tadi telah kita sampaikan.

"Kami berdo'a, semoga keluarga korban meninggal dunia dan yang terdampak longsor ini diberi ketabahan, keshabaran dan dapat bangkit

kembali", pungkasnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan Dana Siap Pakai BNPB untuk rehabilitasi pasca bencana dan Bantuan Sosial bagi korban terdampak senilai ratusan juta, serta acara simbolis penanaman pohon diareal zona rawan longsor.



H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX



Bertemu Jaringan Pemred di Sumbar

Nevi Curhat Pengalaman Dampingi Gubernur Sumbar

KUTIPAN

Padang (16/01) — Sudah terbiasa sering ditinggal pergi itulah curhatan Istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

di hadapan Pemred dan Owner media tergabung pada Jaringan Pemred Sumbar (JPS) pada diskusi "Terima Kasih Pak Gubernur Irwan Prayitno IP", Jumat (15/01/2021) di Hotel Daima Padang, Sumatera Barat

Pasalnya kata Anggota DPR RI Fraksi PKS ini, sejak menikahinya, Irwan Prayitno memiliki latar belakang sebagai aktifis baik kampus mau pun sosial masyarakat.

"Jadi begitu Bapak jadi Anggota DPR RI dan 10 tahun memimpin Sumbar karena tugas dan pengabdian sering ditinggal juga sudah biasa. Justru sebagai istri saya menempatkan diri men-support, dan bapak setiap ada masalah sampai di rumah pantang membawanya ke rumah," ujar Nevi saat menyampaikan rasa suka dan dukanya sebagai pendamping setia Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Kalau pun menupahkan masalah di rumah, Anggota

Komis VI DPR RI ini menempatkan diri sebagai pendengar yang baik saja.

"Kalau ditanya darimana dan apa kegiatan bapak? Pasti bapak suruh tanya ke ajudan aja, ya kalau mau tahu giat bapak, saya disuruh tanya ke ajudan," ujarnya sambil tersenyum.

uncinya dengan suami yang lebih banyak waktu untuk mengabdikan ke masyarakat, kata Nevi, komunikasi dan sinergi serta terus berdoa bermohon kepada Allah untuk bekerja dengan hati.

"Tidak bekerja mencari uang, tahta dan popularitas. Fokus saja bekerja dengan hati," ujar Nevi.

Tapi Irwan Prayitno menegaskan, prinsipnya se-sibuk apapun bekerja, tetap nomor satu adalah keluarga.

"Sedang rapat serius ada WA anak minta pulsa pasti saya jawab tunggu dan segera kirim pulsa. Anak beli HP aja istri saya

ngga tau tuh, anak minta ke saya, kok nggak ke ibu jawab anak berat urusannya yah, hehehe," ujar Irwan Prayitno tersenyum.

IP biasa Gubernur Sumbar disapa, satu bulan lagi akan mengakhiri pengabdian sebagai Gubernur Sumbar dua periode.

Dalam diskusi JPS, IP memastikan puas menjadi pelayan masyarakat Sumbar selama 10 tahun.

"Habis jadi Gubernur biarlah saya jadi ajudan istri saja lagi, hehee. Tapi ada empat kegiatan menanti satu dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rektor Universitas Adzki, Konsultasi Sumber Daya Manusia dan menerbitkan banyak buku," ujar IP.

Akademi Unand Ilham Adelan Azre berharap IP bisa menjadi guru bagi politisi dan pemimpin muda di Sumbar.

"Banyak ilmu dan trik yang dimiliki Pak IP tentu kita berharap Pak IP tidak ke PKS saja bagibaginya, namun mau curah ilmu dan kiat ke pemimpin muda beragam Parpol yang banyak muncul di Sumbar saat ini," ujar Azre.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Jadi begitu Bapak jadi Anggota DPR RI dan 10 tahun memimpin Sumbar karena tugas dan pengabdian sering ditinggal juga sudah biasa. Justru sebagai istri saya menempatkan diri men-support, dan bapak setiap ada masalah sampai di rumah pantang membawanya ke rumah



Bersama Kemendag, Amin Ak. Berikan Bantuan Penunjang UMKM di Jember dan Lumajang

KUTIPAN

Jember (19/01) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan memberikan bantuan penunjang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember dan Lumajang.

Amin mengatakan bantuan berupa perlengkapan masak, panci, kompor, dan tabung gas 3 kg serta coolbox tersebut merupakan bagian upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah Pandemi COVID-19.

"Bantuan diberikan kepada para pelaku UMKM binaan Global Entrepreneur and Professional (Genpro), sebuah komunitas pelaku usaha yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan penciptaan entrepreneur di kalangan anak muda," pungkas Amin.

Bantuan yang merupakan

aspirasi dari Amin Ak sebagai Wakil Rakyat dari Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut diserahkan, Selasa (19/01/2021).

Amin menyebutkan paket penunjang usaha yang diberikan terdiri masing-masing 20 paket bantuan untuk Kabupaten Jember dan Lumajang. Sehingga total ada 40 pelaku UMKM makanan yang menerima bantuan.

"Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut untuk

mengembangkan usahanya. Meskipun jumlahnya terbatas, bantuan ini sangat besar manfaatnya bantuan pengembangan usaha. Insya Allah UMKM bisa bangkit dan, perekonomian kita mampu keluar dari resesi," kata Amin.

Amin pun meminta Genpro agar terus mendampingi dan membina pelaku UMKM penerima bantuan agar mampu untuk mengembangkan usahanya terutama di tengah pandemi ini. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, maka pelaku UMKM bisa berkembang usahanya bahkan naik kelas.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Saya minta Genpro terus memberikan pengetahuan bisnis pada UMKM terutama manajemen usaha profesional mulai dari kualitas produk, branding produk, hingga teknik-teknik pemasaran," pungkasnya.



AMIN AK, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur IV

"Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan usahanya. Meskipun jumlahnya terbatas, bantuan ini sangat besar manfaatnya bantuan pengembangan usaha. Insya Allah UMKM bisa bangkit dan, perekonomian kita mampu keluar dari resesi





Komisi X FPKS DPR RI: Kami Akan **Terus** **Perjuangkan** Nasib Para Guru Honorer Bersertifikat

KUTIPAN

Jakarta (15/01) --- Pada Hari Aspirasi yang diadakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejumlah anggota Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi X FPKS DPR RI.

Para anggota menyampaikan keluhan mereka mengenai Rekrutmen guru honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) dan rekrutmen guru ASN 2021.

Forum Guru mengeluhkan skema PPPK dan ASN 2021, di mana para guru yang sudah bersertifikasi tetap harus bersaing dengan golongan lainnya.

Merespon aspirasi para guru, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa, menyatakan bahwa salah satu masalah yang masih harus diatasi adalah komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Ada problem, yaitu komunikasi yang buruk antara

pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya intensif P3K ini di dorong ke pemerintah daerah, namun sejak awal pemerintah daerah sudah mempunyai APBD di mana tidak membahayakan PPPK." Ucap Anggota Komisi X Fraksi PKS itu.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi X FPKS DPR RI, Fikri Faqih juga menyampaikan pendapatnya mengenai isu Rekrutmen guru honorer ini.

"Kita akan menjembatani aspirasi guru kepada pemerintah melalui forum-forum. Tanggal 18 kita akan mengadakan rapat gabungan dengan Kemendikbud sebagai tidak lanjut dari hasil RDP tanggal 24 November 2020 yang lalu terkait tenaga honorer

yang telah lulus PPPK."

Anggota Komisi X FPKS DPR RI, Sakinah Aljufri, juga menambahkan bahwa Fraksi PKS akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan nasib para guru honorer.

"Masalah honorer blm ada tuntas. Masih hanya janji dari pemerintah saja. Seperti K2 yang masih belum tuntas, sekarang muncul lagi PPPK yang SK nya belum turun. Kita akan berusaha semaksimal mungkin demi guru honorer bersertifikat."

Forum guru mengharapakan bahwa pemerintah menuntaskan terlebih dahulu permasalahan honorer khususnya di sekolah negeri, sebelum membuka rekrutmen untuk honorer swasta dan sebagainya.

"Para guru honorer yang telah bersertifikat dan telah memiliki pengalaman kerja seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang golongan yang lain." Ucap Ketua Umum FGHBSN, Rizki Safari Rakhmat.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Salah satu masalah yang masih harus diatasi adalah komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada problem, yaitu komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya intensif P3K ini di dorong ke pemerintah daerah, namun sejak awal pemerintah daerah sudah mempunyai APBD di mana tidak membahas PPPK



**Turut
Berduka
Cita**



PKS

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas Wafatnya

Ust. Abdullah Qomaruddin, Lc

Dosen dan Pendakwah

Semoga semua kebaikan & amal ibadah
Almarhum diterima di sisi Allah SWT.
Semoga keluarga yang ditinggalkan
diberikan kekuatan dan kesabaran.



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

PKS Terus Tunjukkan Keberpihakan Dalam Pemberdayaan UMKM

KUTIPAN

Jakarta (16/01) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus berupaya menunjukkan keberpihakan dalam pemberdayaan UMKM.

Termasuk saat pembahasan RUU Cipta Kerja, PKS memasukkan klausul-klausul yang menyangkut UMKM secara detail.

"Seperti pasal-pasal yang berpihak kepada UMKM dalam perlindungan dan kemudahan berusaha," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhul saat membuka Webinar Nasional ke 1 bertema UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi, Sabtu (16/01/2021).

Sejumlah pembicara tampil dalam webinar ini, diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Anggota DPR Fraksi PKS yang juga Ketua BPJE DPP PKS Rofik Hananto, Ketua Bidang Pembinaan Kepemimpinan Daerah DR Zulkiflimansyah, Presiden Gen-Pro Abah Iwan dan menghadirkan guest star CEO Doyan Makan SL Corp Indro Wawan.

Dalam sambutannya,

Ahmad Syaikhul menambahkan, UMKM di Indonesia penting dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia 64 juta unit. Mudah-mudahan potensi ini bisa terus berkembang dan kontribusi terhadap PDB terus meningkat.

"UMKM di masa pandemi mengalami hantaman. Penurunan pendapatan, kesulitan bahan baku, hambatan produksi, permasalahan permodalan. Pemerintah berusaha memberi dukungan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Namun masih perlu penataan pendataan di lapangan," ujarnya.

Syaikhul mengakui perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap ke depan berbagai program pemerintah semakin baik dan tepat sasaran kepada pelaku

UMKM sehingga alokasi Rp 63,84 triliun betul-betul sampai, baik berupa subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan UMKM, penempatan dana dari perbankan, dan pinjaman cost limit.

"Oleh karena itu perlu kita lakukan pengawalan. Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemberdayaan UMKM yang dijalankan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Tentu pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi sampai level bawah. Pelaku UMKM juga perlu ikut melakukan pengawasaan," tegasnya.

Syaikhul menjelaskan, selaku Presiden PKS dirinya telah mengeluarkan 3 instruksi dukungan PKS terhadap UMKM. Pertama, pemberian bantuan langsung bagi pemberdayaan UMKM oleh para pejabat publik PKS seperti gubernur, bupati, anggota dewan di semua tingkatan dari para tokoh struktur partai.

Kedua, bantuan modal kerja bagi UMKM yang tidak terlalu membebani, baik melalui program dana bergulir maupun hibah bantuan modal dan kerja sama usaha.

"Ketiga, mendorong



kepada seluruh keluarga besar PKS untuk proaktif membeli hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang industri kreatif, pertanian, peternakan, kuliner hingga industri rumah tangga," kata Syaikhul.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang terdampak dari hulu sampai hilir.

"UMKM dan Koperasi menunjukkan peran penting dalam proses pemulihan dampak pandemi. Lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap 14 persen ekspor non-

ming dan 97 persen total penyerapan tenaga kerja. Dan 61 persen kontribusi PDB nasional," katanya.

Dia menambahkan, pelaku usaha di Indonesia tulang punggungnya adalah UMKM. Dari waktu ke waktu UMKM terbukti menjadi pilar ekonomi nasional. Selama tahun 2020 pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan dari supply and demand dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan di masa pandemi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Mustafa Kamal: Kita Harus Bersyukur Pancasila Mampu Satukan Indonesia dalam Keberagaman

KUTIPAN

Palembang (17/01) — Anggota DPR dari Fraksi PKS Dapil Sumatera Selatan I, Mustafa Kamal menjadi pembicara utama dalam kegiatan Spesial Webinar Kebangsaan dengan tema “Pancasila diantara Ideologi Besar Dunia” yang diselenggarakan oleh Bidang Kaderisasi DPD PKS Palembang.

Acara dilaksanakan dalam rangka mengokohkan pemahaman kebangsaan bagi para kader PKS dan masyarakat umum.

Dalam diskusi tersebut, Mustafa menyampaikan bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa founding fathers kita telah merumuskan Pancasila yang mampu membuat negara kita menjadi bersatu dalam keberagaman.

“Kita bersyukur bahwa founding fathers kita bisa melakukan satu proses perenungan yang mendalam, menggali nilai-nilai tradisional yang ada, mengangkat

khasanah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membuka wawasan dengan perkembangan dunia internasional saat itu, terutama pemikiran dari ideologi-ideologi besar sehingga akhirnya bisa mencapai satu rumusan dalam bentuk Pancasila dengan 5 sila yang merupakan satu kesimpulan yang membuat negara kita menjadi bersatu dalam keberagaman luar biasa,” jelas Mustafa.

Lebih lanjut, Mustafa yang juga merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini memberikan

penjelasan bahwa setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia memiliki identitas yang jelas, tidak mengambil dari salah satu ideologi besar dunia, yaitu Pancasila itu sendiri.

“Di tengah pengaruh ideologi besar saat itu (liberalisme, komunisme, fasisme, kapitalisme, sosialisme), dimana negara-negara baru merdeka setelah Perang Dunia II kebanyakan mengambil salah satu dari ideologi besar ini. Kita bersyukur bangsa Indonesia merdeka dengan identitas yang jelas, tidak mengambil salah satu dari ideologi besar itu, dan memiliki ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Inilah pencapaian dakwah Islam, pencapaian para Ulama kita di Indonesia yang luar biasa, menjadikan negara kita negara Pancasila. Bukan negara liberal yang sekuler, bukan pula negara kapitalis yang 'dzalim' secara ekonomi, apalagi negara komunis,” lanjut Mustafa.

Mustafa juga mengajak peserta diskusi untuk mendukung Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya sebagai hafa-



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Selatan I

“Kita bersyukur bahwa founding fathers kita bisa melakukan satu proses perenungan yang mendalam, menggali nilai-nilai tradisional yang ada, mengangkat khasanah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

lan, tapi menjadi nilai-nilai yang mengikat kita dalam perilaku.

“Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar dan ideologi negara. Bukan hanya sekadar menjadi hafalan, tetapi menjadi nilai-nilai yang mengikat kita dalam perilaku. Maka kita perlu menguatkan komitmen

bersama ini’, ajak Mustafa.

Terakhir, Mustafa juga menyoroti adanya perdebatan kembali mengenai Pancasila baru-baru ini. Ia menyampaikan bahwa kita sudah sampai pada konsensus final Pancasila hasil rumusan 18 Agustus 1945.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***